



**ALASAN INDIA BERGABUNG DALAM SHANGHAI
COOPERATION ORGANIZATION**

(The India's Reason to Join The Shanghai Cooperation Organization)

SKRIPSI

Oleh :

Bahrul Ulum Arifin

120910101049

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**ALASAN INDIA BERGABUNG DALAM SHANGHAI
COOPERATION ORGANIZATION**

(The India's Reason to Join The Shanghai Cooperation Organization)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh :

Bahrul Ulum Arifin

120910101049

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda M. Hari Agustami, dan Ibunda Indajati yang terus mendukung serta mendoakan saya hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya, Moch. Reza Afandi yang terus memberikan semangat serta motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.
3. Almamater yang penulis banggakan, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Mantan Kekasih saya, Nanda Kartika Ayu sebagai motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Si vis pacem para pacem”¹

(jika kau ingin perdamaian, bersiaplah untuk berdamai)

(Barthélemy Prosper Enfantin)



¹ Saint-Simon, C. D., *Oeuvres de Saint-Simon Et d'Enfantin*, London, Forgotten Books, 2018, hal 34

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahrul Ulum Arifin

NIM : 120910101049

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “Alasan India Bergabung dalam Shanghai Cooperation Organization” merupakan hasil karya sendiri, menggunakan kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan bukan karya plagiat. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi dari karya ilmiah ini dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bukti dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,.....2019

Yang menyatakan

Bahrul Ulum Arifin
NIM. 120910101049

SKRIPSI

**ALASAN INDIA BERGABUNG DALAM SHANGHAI
COOPERATION ORGANIZATION**

(The India's Reason to Join The Shanghai Cooperation Organization)

SKRIPSI

Oleh :

Bahrul Ulum Arifin

120910101049

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Agus Trihartono, S.Sos, MA, Ph.D.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph.D.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Alasan India Bergabung dalam Shanghai Cooperation Organization**” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Juni 2019
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji
Ketua,

Drs. Agung Purwanto, M. Si
NIP. 196810221993031002

Sekretaris I

Sekretaris II

Agus Trihartono, S.Sos., MA., Ph.D.
NIP. 196908151995121001

Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph.D
NIP. 196402081989021001

Penguji I

Penguji II

Fuat Albayumi, S.IP., MA.
NIP.197404242005011002

Linda Dwi Eriyanti, S.Sos, MA., Ph.D.
NIP.197708102006042000

Mengesahkan,
Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Hadi Prayitno M.Kes.
NIP. 196106081988021001

RINGKASAN

ALASAN INDIA BERGABUNG DALAM SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION ; Bahrul Ulum Arifin; 120910101049; 82 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Keputusan India bergabung dengan SCO pada tahun 2006 sebagai Negara pengamat merupakan keputusan yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Hal ini dikarenakan hubungan diplomatik India dengan China sebagai motor utama dalam organisasi keamanan regional ini tidaklah cukup baik. Pada sejarah awal berdirinya kedua negara ini India dan China merupakan kerabat dekat karena latar belakang sejarah dan kesamaan ideologi. Dalam perkembangannya kedua negara ini mulai mengalami ketegangan hingga timbul konflik yang disebabkan masalah perbatasan, persaingan pengaruh di wilayah asia timur serta hubungan diplomatik dengan negara lain, bahkan kedua negara ini juga menghadapi potensi konflik lain dari permasalahan sumber air di Tibet. Di sisi lain India dan China juga memiliki potensi kerja sama baik dalam bidang ekonomi maupun keamanan. China menawarkan kerjasama ekonomi yaitu pembangunan jalur perdagangan yang disebut BRI, Sedangkan dalam bidang keamanan, India dan China sudah tergabung dalam satu forum yang sama yaitu ARF. Oleh karena itu sangat dimungkinkan adanya kerja sama di bidang keamanan lebih lanjut untuk meredam tensi konflik ari kedua negara ini. Pada awalnya bergabungnya India, China menunjukkan keengganan untuk menerima India sebagai anggota tetap SCO. Setelah melalui proses yang panjang, pada akhirnya India resmi menjadi anggota tetap SCO pada tahun 2017 setelah diputuskan dalam Konferensi Tingkat Tinggi SCO di Astana, Kazakshtan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui alasan India bergabung dalam SCO.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Proses pengumpulan data yang diperlukan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library reaserch*). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa informasi mengenai SCO sebagai organisasi kerjasama regional dan keuntungan India setelah bergabung dengan SCO. Konsep yang digunakan adalah CBM dari Simon J.

A. Mason dan Matthias Siegfried dan Teori Neo Liberalisme Institusional menurut Robert Owen Keohane. Data kemudian dianalisis dan disusun untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan keputusan India bergabung dengan SCO adalah untuk menambah jalur komunikasi dengan China dan negara anggota lainnya agar tercipta *Confidence building (Political CBM)* yaitu membangun kepercayaan di antara negara anggota SCO khususnya China dengan tujuan mencapai solusi politis melalui mekanisme yang ada di SCO dan pertemuan pemimpin negara setelah India bergabung dalam SCO. Selain itu India juga mengejar keuntungan dari bergabung dengan SCO. Dalam bidang ekonomi, bergabungnya India dengan SCO akan menjadi dorongan diplomatik dalam upaya India untuk terhubung kembali dengan Asia Tengah yang diharapkan memasok kebutuhan energi India yang besar serta meningkatkan kerja sama ekonomi di bidang perdagangan dengan negara negara di Asia tengah. Dalam bidang keamanan antara lain India dapat memainkan peran aktif di lingkungan regional dan mengawasi pengaruh yang terus tumbuh dari China di Eurasia serta mengurangi ketegangan di antara keduanya. Keanggotaan penuh India di SCO akan memungkinkannya untuk memainkan peran penting dalam *Regional Anti-Terrorist Structure (RATS)*. Melalui RATS, India dapat meningkatkan pengalaman kontra terorismenya. Keanggotaan SCO juga akan memungkinkan India untuk menghalangi upaya Pakistan untuk menggunakan forum SCO untuk memobilisasi dukungan untuk kegiatan anti-India. Pada akhirnya sebagai anggota sebuah organisasi yang pengaruhnya terus berkembang, India akan mencapai posisi yang kuat di dunia dengan melihat fakta besarnya sumber daya yang dimiliki SCO.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayah-nya sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Alasan India Bergabung dalam Shanghai Cooperation Organization”. Skripsi ini disusun penulis untu memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Agus Trihartono, S.Sos, MA, Ph.D selaku dosen pembimbing utama dan Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph.D selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan terhadap penyusunan skripsi ini.
3. Adhiningasih Prabhawati, S.Sos, M. Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah mendukung dan membimbing penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Jember.
4. Semua mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah menjadi tempat tukar pikiran terhadap penyusunan skripsi ini.
5. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat pada proses penyusunan skripsi ini.

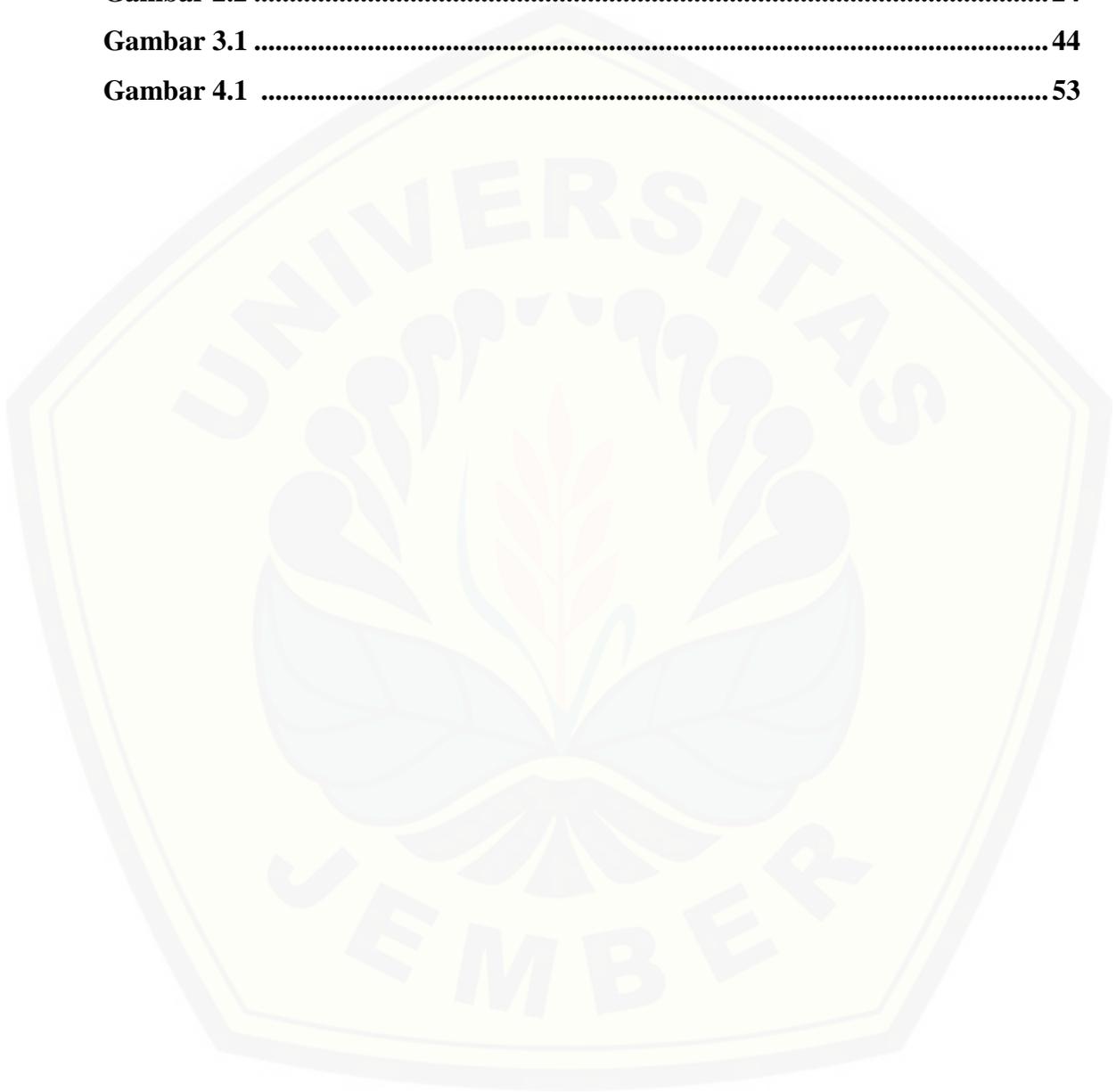
DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN.....	iv
SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN.....	v
RINGKASAN	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.4.1 Batasan Materi	5
1.4.2 Batasan Waktu	5
1.5 Landasan Konseptual.....	6
1.6 ArgumenUtama	13
1.7 Metode Penelitian	14
1.7.1 Metode Pengumpulan data.....	14
1.7.2 Teknik Analisis Data.....	15
1.8 Sistematika Penulisan	15
BAB 2. DINAMIKA HUBUNGAN POLITIK ANTARA INDIA DAN CHINA. 17	
2.1 Dinamika Hubungan Diplomatik India dan China.....	17
2.1.1 Awal Mula Hubungan Diplomatik India dan China	17

2.1.2	Terjadinya Konflik antara India dan China.....	19
2.1.3	Potensi Konflik India dan China.....	23
2.1.4	Potensi Kerjasama antara India dan China.....	26
2.2	Hubungan Diplomatik India dan China dengan Negara Tetangga Dalam Persaingan Pengaruh di Kawasan Asia Selatan	28
BAB 3.	SHANGHAI COOPRATION ORGANIZATION	32
3.1	Apa itu SCO.....	32
3.1.1	Sejarah dan Perkembangan SCO	32
3.1.2	Keanggotaan SCO.....	43
3.1.3	Sistem kerja SCO	44
3.1.4	Hubungan Eksternal SCO	45
BAB 4.	ALASAN INDIA BERGABUNG DALAM SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION (SCO) DI TENGAH KONFLIKNYA DENGAN CHINA	50
4.1	Pentingnya CBM dalam dalam Hubungan Diplomatik India dan China	50
4.2	SCO Sebagai Instrumen Komunikasi dalam Tahap membangun kepercayaan (<i>Confidence-Building</i>).....	52
4.3	Kesempatan dan Keuntungan India dalam Bergabung dengan SCO... 65	
4.3.1	Kesempatan dan keuntungan yang akan diperoleh India setelah bergabung dengan SCO di Bidang Ekonomi	67
4.3.2	Kesempatan dan keuntungan yang akan diperoleh India setelah bergabung dengan SCO di Bidang Keamanan.....	69
BAB 5.	KESIMPULAN	72
DAFTAR PUSTAKA		74

DAFTAR GAMBAR

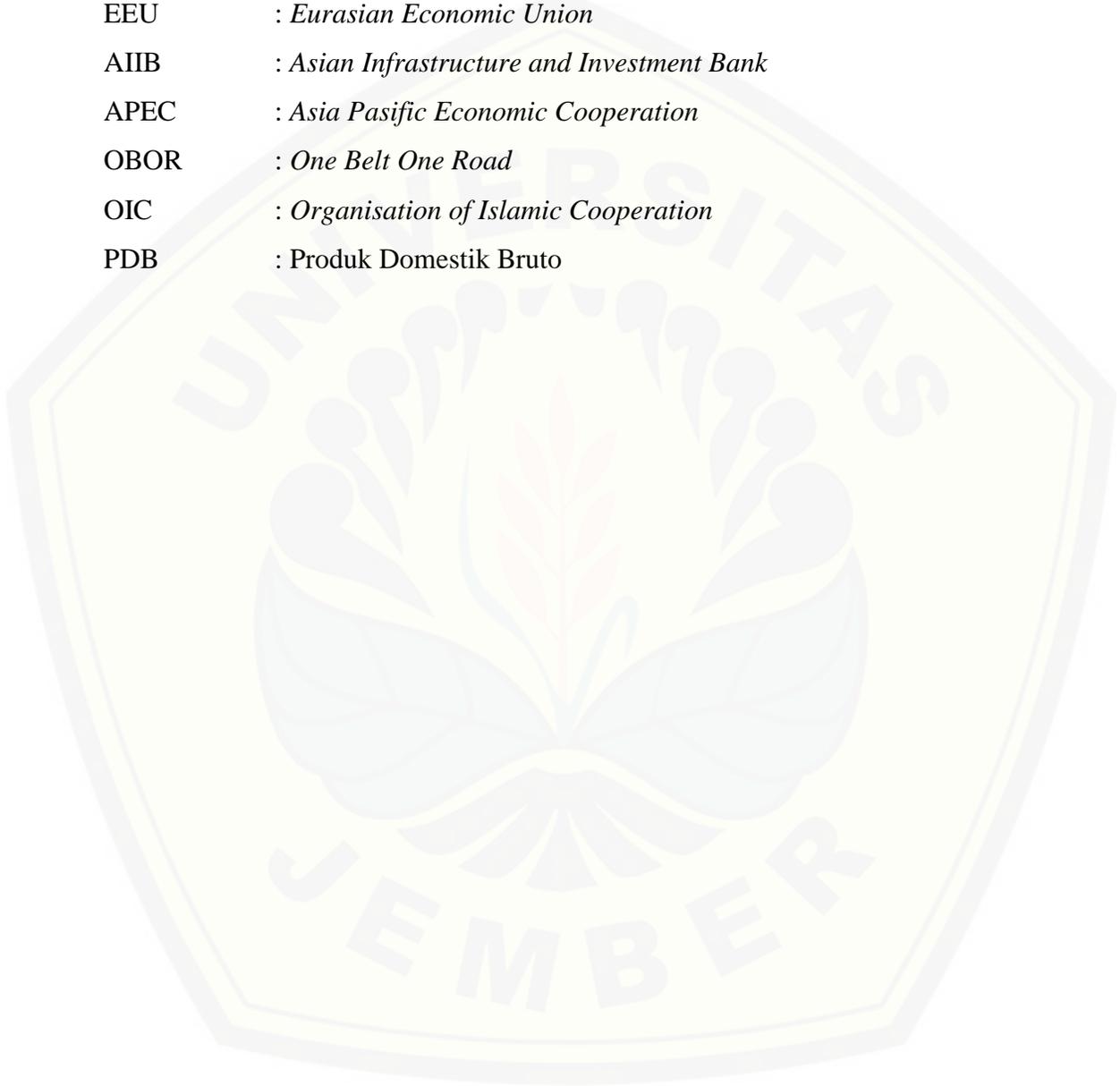
Gambar 2.1	20
Gambar 2.2	24
Gambar 3.1	44
Gambar 4.1	53



DAFTAR SINGKATAN

SCO	: <i>Shanghai Organization Cooperation</i>
NITI	: <i>National Institution of Transforming India</i>
BRI	: <i>Belt Road Initiative</i>
ARF	: <i>ASEAN Regional Forum</i>
CBM	: <i>Confidence Building Measure</i>
PRC	: <i>People's of Republic of China</i>
ROC	: <i>Republic of China</i>
GWWD	: <i>Grand Western Water Diversion Plan</i>
PoK	: <i>Pakistan Occupied Kashmir</i>
IIDS	: <i>Indian Institute for Defense Studies</i>
KTT	: <i>Konferensi Tingkat Tinggi</i>
HSC	: <i>Heads of State Council</i>
HGC	: <i>Heads of Government Council</i>
CNC	: <i>Council of National Coordinators</i>
RATS	: <i>Regional Anti-Terrorist Structure</i>
CANWFZ	: <i>Central Asian Nuclear Weapon Free Zone</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
CSTO	: <i>Collective Security Treaty Organization</i>
CIS	: <i>Commonwealth of Independent States</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ECO	: <i>Economic Cooperation Organisation</i>
UNODC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
CICA	: <i>Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia</i>
ICRC	: <i>International Committee of the Red Cross</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa Bangsa</i>
BRICS	: <i>Brazil, Rusia, India, China, South Africa</i>
CAR	: <i>Central Asian Region</i>

TAPI	: <i>Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India</i>
IPI	: <i>Iran-Pakistan-India</i>
CASA	: <i>Central Asia–South Asia</i>
FTA	: <i>Free Trade Agreement</i>
EEU	: <i>Eurasian Economic Union</i>
AIIB	: <i>Asian Infrastructure and Investment Bank</i>
APEC	: <i>Asia Pasific Economic Cooperation</i>
OBOR	: <i>One Belt One Road</i>
OIC	: <i>Organisation of Islamic Cooperation</i>
PDB	: <i>Produk Domestik Bruto</i>



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerjasama internasional merupakan hal vital yang terjadi dalam perubahan arus politik internasional. Globalisasi lah yang menjadi pemicu dalam perubahan pandangan politik dunia yang sebelumnya lebih mengarah pada perbandingan kekuatan militer menjadi lebih mengarah pada kekuatan ekonomi. Kerjasama internasional dipandang sebagai bentuk multilateralisme yang lingkupnya sangat luas terkait dengan hubungan dua negara atau aktor lainnya. John Ruggie mendefinisikan multilateralisme sebagai bentuk institusional yang mengatur hubungan antar beberapa negara berdasarkan prinsip-prinsip perilaku yang umum termasuk diantaranya organisasi internasional, rezim internasional dan kondisi yang belum terjadi yaitu keteraturan internasional. Perilaku kerjasama internasional dapat berlangsung dalam situasi institusional yang formal dengan aturan, norma atau prosedur pengambilan keputusan umum yang telah disetujui. Melalui multilateralisme itulah organisasi internasional, rezim internasional, dan aktor internasional meletakkan konsep keteraturan dan integrasi untuk menciptakan suatu kesatuan (Ruggie, 1993, pp. 3-14).

SCO atau *Shanghai Cooperation Organization* merupakan organisasi kerjasama regional yang dulu dikenal sebagai kelompok *Shanghai Five*. Organisasi ini pertama kali mengadakan pertemuan pada bulan April tahun 1996 di Kota Shanghai dan dihadiri oleh China, Rusia, Kazakstan, Kirgistan, Tajikistan. Tujuan utama pada pertemuan ini adalah untuk mengurangi ketegangan atau menyelesaikan masalah perbatasan antara China dan negara-negara tetangganya, terutama negara-negara bekas Uni Soviet, membicarakan masalah keamanan lainnya, dan membantu perkembangan pembangunan ekonomi di kedua pihak pada batas bersama. Pada tahun 2001 tepatnya pada 15 Juni, *Shanghai Five* berubah nama menjadi SCO dengan masuknya salah satu negara baru yakni Uzbekistan (Santiko, 2008). SCO memiliki

prinsip utama yang tertuang pada piagam *Shanghai Cooperation Organization Charter*.

“mutual respect of sovereignty, independence, territorial integrity of States and inviolability of State borders, non-aggression, non-interference in internal affairs, non-use of force or threat of its use in international relations, seeking no unilateral military superiority in adjacent areas” (SCO, 2018)

SCO dibentuk tujuan untuk memperkuat rasa saling percaya dan meningkatkan kerja sama di segala bidang antar negara anggotanya, terutama dalam kerjasama keamanan, perdamaian dan stabilitas regional serta membangun kekuatan baru dalam bidang ekonomi dan politik dengan batasannya yaitu saling menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggotanya (Sinaga, 2017). Kini Rusia dan China merupakan negara anggota SCO yang memiliki peranan paling penting dalam organisasi SCO. China merupakan kekuatan baru dalam bidang perekonomian, sedangkan Rusia merupakan negara dengan salah satu sistem militernya yang kuat. Dengan hadirnya Rusia dan China sebagai penggerak organisasi SCO, membuat beberapa Negara sekitar kawasan Asia Selatan mulai menginginkan menjadi anggota SCO, yang mana negara anggota yang baru adalah India .

India bergabung dengan SCO pada tahun 2006 dengan status sebagai negara peninjau. Pada awal masuknya India sebagai anggota baru SCO mendapat respon buruk dari China bahkan mereka selalu terlihat enggan untuk menerima India sebagai anggota SCO. Hal itu ditunjukkan oleh statement juru bicara menteri luar negeri China yang menyatakan akan keengganan untuk memperluas keanggotaan SCO *“enlargement is a complicated issue which bears on the further development of the SCO”*. (China-embassy.org, 2010) Meskipun tidak secara langsung menunjuk pada India namun pernyataan tersebut dilontarkan saat India berkeinginan untuk masuk menjadi anggota tetap SCO

Hubungan antara China dan India selama ini memang belum dapat saling menerima satu sama lain karena kedua negara tersebut mempunyai sejarah diplomatik

yang cukup buruk. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi kedua negara sebagai kekuatan global dimana keduanya sudah mempunyai senjata nuklir serta ekonomi yang berkembang secara pesat. Permasalahan yang terjadi pun semakin kompleks terlebih karena letak geografis kedua negara yang berdekatan. Kedua negara pun juga bersaing akan pengaruhnya terhadap wilayah Asia Selatan dan Samudera Hindia.

Sejarah sudah mencatat telah terjadi tiga konflik perbatasan antar kedua Negara yaitu pertama pada tahun 1962 yang dikenal sebagai perang *Sino India War* yang memakan ribuan korban tentara India serta kehilangan puluhan ribu kilometer wilayahnya (Dutta, 2017). Yang kedua adalah Pertikaian Nathu La dan Cho La, yang terjadi pada 11 September 1967 di sepanjang perbatasan Sikkim yang dimulai oleh China yang melewati perbatasan India (Chaudhury, 2018) dan yang terakhir adalah konflik yang terjadi di wilayah perbatasan antara India China dan Bhutan (Dolkam) yang pada dasarnya merupakan konflik antara China dan Bhutan namun India hadir atas dasar permintaan Bhutan sebagai bentuk kedekatan hubungan diplomatiknya (Debora, 2017).

Selain masalah perbatasan India dan China mempunyai banyak sumber konflik lainnya seperti permasalahan sumber air yang berasal dari pegunungan Himalaya yang sepertinya ingin dikuasai oleh China yang pada kenyataannya juga merupakan sumber air bagi India dan negara-negara di sekitarnya. Hubungan bilateral ini juga semakin rumit akibat permasalahan sengketa minyak di Laut China Selatan. Belum lagi kedekatan China dengan Pakistan yang juga merupakan musuh bebuyutan dari India yang mempunyai sejarah konflik yang tak kalah panjang (Hein, 2012).

Setelah melalui proses yang panjang dalam perundingan antara negara-negara anggota maka pada tahun 2017, India dan Pakistan resmi menjadi anggota SCO setelah diputuskan dalam Konferensi Tingkat Tinggi SCO di Astana, Kazakhshtan (Kompas, 2017). Dengan bergabungnya India dalam SCO menjadikan hal tersebut sebagai salah tolak ukur perkembangan SCO di kawasan regional (Maulana, 2015)

Fenomena ini juga semakin menarik untuk dibahas karena baru-baru ini berdasarkan pernyataan wakil ketua NITI (*National Institution of Transforming*

India) Aayog Rajiv Kumar bahwa India telah menolak tawaran China untuk bergabung dalam rancangan ekonomi China yaitu *Belt and Road Initiative* (BRI) untuk membuat jalur sutra atau jalur perdagangan internasional yang rencananya akan melalui wilayah Kashmir yang merupakan wilayah sengketa antara India, Pakistan dan sebagian wilayah China (Patranobis, 2018). Meskipun pada awal bergabungnya India sebagai negara anggota SCO mendapat penolakan dari pihak China akan tetapi dengan berhasilnya India menjadi anggota SCO pada tahun 2017, menandakan ada upaya serius dari pemerintah India setelah menunggu selama 11 tahun untuk menjadi anggota SCO. Terlepas dari fakta bahwa kedua negara ini juga sudah tergabung dalam suatu forum yang sama yaitu *ASEAN Regional Forum* (ARF) sebagai mitra dialog yang pada dasarnya organisasi ini juga membicarakan ranah yang sama yaitu keamanan (Ministry of External Affairs Government of India, 2012). Keterlibatan India dan China dalam organisasi ini masih dirasa belum cukup mengurangi ketegangan antara keduanya. Munculnya konflik di Doklam tahun 2017 menunjukkan kedua negara ini masih mempunyai selisih paham satu sama lain.

Dengan bergabungnya India ke SCO ini ditengarai ada tujuan untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan meningkatkan kepercayaan, keamanan antar negara Asia Selatan terutama dengan negara China dan sekitarnya. Dengan latar belakang tersebut maka pada penulisan skripsi ini, penulis memilih judul “**Alasan India bergabung dalam SCO (*Shanghai Cooperation Organization*)**”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan ringkasan pertanyaan yang dimunculkan untuk dijawab dalam suatu penelitian. Dalam skripsi ini permasalahan yang diajukan terfokus pada keputusan India untuk bergabung dengan SCO yang diinisiasi dan dimotori oleh China di tengah permasalahan diplomatik nya dengan China itu sendiri. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis mrumuskan masalah

sebagai berikut : “**Mengapa India bergabung dalam *Shanghai Cooperation Organization*?**”

1.3 Tujuan Penelitian

Penentuan tujuan penelitian didasari pada masalah yang diajukan dalam penelitian. Inti dari tujuan penulisan berisi tentang kontribusi hasil penelitian terhadap kepentingan keilmuan atau kepentingan lainnya yang bersifat praktis. Sehingga Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepentingan India dalam keputusannya bergabung dengan SCO ditengah buruknya hubungan diplomatik dengan China sebagai penggagas SCO

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian karya ilmiah memiliki kedudukan paling penting dalam membatasi penelitian agar penelitian dapat terfokus dan dapat menjawab rumusan masalah. Pembahasan masalah akan lebih mudah dianalisis ketika batasan penelitian telah ditentukan. Ruang lingkup pembahasan terdiri dari dua batasan, yaitu batasan materi dan batasan waktu

1.4.1 Batasan Materi

Batasan materi berfungsi untuk menunjukkan ruang pembahasan objek yang akan dianalisis agar pembahasan tidak keluar jalur. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada alasan India bergabung dengan SCO ditengah konfliknya dengan China.

1.4.2 Batasan Waktu

batasan waktu berfungsi sebagai batasan rentang waktu penelitian mulai kapan dan sampai kapan materi berlangsung. Batasan waktu menentukan relevan atau tidaknya objek yang dianalisis. Sehingga Penulis menggunakan rentan waktu tahun 2006 saat India memutuskan untuk bergabung dengan SCO hingga tahun 2018 setelah India diterima menjadi anggota tetap SCO

1.5 Landasan Konseptual

Landasan konseptual sangatlah penting dalam menunjukkan posisi penulis dalam menganalisa suatu permasalahan. Konsep dalam memahami dan menjawab penelitian ini mengarah pada konsep CBM (*Confidence Building Measure*). Konsep ini muncul pertama kali dalam Perang Dingin, di mana didirikan *hotline* jaringan komunikasi antar berbagai pejabat negara dan personil militer di Amerika Serikat dan Uni Soviet (Shopie, 2007). Dalam perkembangannya, sistem CBM digunakan oleh banyak negara untuk mengurangi terjadi kemungkinan penggunaan instrumen militer dalam penyelesaian konflik.

Signifikansi penggunaan CBM menjadi instrumen penyelesaian dan peredaman konflik menurut Chari dengan cara mendorong kesepahaman bersama yang mana akan mencapai nilai saling kesepahaman antar kedua belah pihak yang bersengketa (Chari, 2003). Selanjutnya CBM juga muncul dalam konteks manajemen konflik Eropa pada tahun 1970-an, CBM pun berevolusi menjadi lebih sistematis dan kompleks yang di dalamnya termasuk aspek militer, budaya, dan pertukaran sosial, dan telah diterapkan untuk penyelesaian konflik di seluruh dunia, termasuk di Asia (Glaser, 2019).

Menurut Johan Jorgen Holst (Holst, 1983)

"Confidence building measures (CBMs) may be defined as arrangements designed to enhance assurance of mind and belief in the trust-worthiness of states —confidence is the product of much broader patterns of relations than those which relate to military security. In fact, the latter have to be woven into a complex texture of economic, cultural, technical and social relationships."

Konsep CBM ini dianggap relevan dalam menangani penyelesaian kebuntuan politik jangka panjang (Glaser, 2019). Konsep ini bertujuan menciptakan suasana kondusif yang memfasilitasi penyelesaian konflik. Pada dasarnya CBM adalah langkah-langkah yang membantu membangun kepercayaan, mengurangi

kesalahpahaman yang tidak diinginkan sehingga memicu konflik terbuka dan bahkan ditujukan untuk mengurangi ketegangan yang ada. Konsep CBM juga dirancang untuk meningkatkan pemahaman dengan mengurangi kecurigaan antar negara yang berkonflik, oleh karena itu konsep ini digunakan sebagai mekanisme atau instrumen yang efektif untuk mencegah perang, dan memfasilitasi resolusi konflik (Javaid, 2006). Lebih lanjut Desjardin mengatakan bahwa

“CBMs can be an effective mechanism for prevention of war, arms control and disarmament, agreements and facilitating conflict resolution” (Desjardins & France, 1996) .

Meskipun pada awalnya CBM lebih mengarah pada aspek militer seperti yang terjadi ada masa perang dingin, pemahaman CBM juga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sesuai dengan konteksnya. Pihak yang terlibat dalam konflik cenderung tidak ingin melakukan komunikasi karena kurangnya rasa saling percaya satu sama lain apalagi melakukan negosiasi untuk penyelesaian masalah. Oleh karena itu dengan mengurangi kecurigaan antar kedua pihak akan membantu proses negosiasi untuk menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima kedua pihak.

Dalam prosesnya mediator diperlukan untuk membantu memunculkan rasa kepercayaan tersebut. Melalui CBM, mediator akan menurunkan pandangan pandangan buruk yang dimiliki pihak yang berkonflik karena hal tersebut merupakan hambatan dalam proses terjadinya negosiasi bahkan sebelum negosiasi terjadi. Namun perlu diingat bahwa CBM ini tidak bertujuan untuk membuat pihak yang berkonflik untuk saling menyukai satu sama lain karena tentu terdapat batasan batasan di dalamnya atau bahkan untuk mencari akar dari permasalahan sehingga menimbulkan asumsi akan pihak mana yang salah dan pihak mana yang benar. CBM ini diperlukan untuk mengakomodasi pendapat, keinginan serta tujuan dari masing masing pihak yang terlibat dan akan menjadi jembatan dalam sebuah negosiasi sehingga terbentuk hubungan yang lebih akomodatif.

Bagaimanapun tidak dapat dipungkiri selain adanya rasa saling curiga akan selalu ada kepentingan politik dalam sebuah negosiasi yang akan menjadi hambatan

dalam CBM. Oleh karena itu untuk menggunakan CBM secara efektif maka perlu dipahami terlebih dahulu apa tujuan dari penggunaan CBM, siapa actor yang terlibat, kapan CBM perlu digunakan dan bagaimana CBM diaplikasikan. Dalam Kasus ini dapat dipahami bahwa tujuan dari CBM dalam konflik antara India dan China adalah memberi fasilitas negosiasi, komunikasi serta mediasi antar kedua Negara. Sesuai dengan tujuannya bahwa CBM digunakan untuk mencegah perluasan konflik serta untuk menginisiasi dilaksanakannya sebuah negosiasi yang menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima kedua pihak. Terdapat tiga aktor yang terlibat dalam proses CBM menurut Simon J. A. Mason yaitu (Simon & Siegfried, 2013) :

1. *Negotiator*, adalah perwakilan dari kedua pihak yang bertugas untuk membangun rasa saling percaya dalam proses negosiasi
2. *Decision Makers*, meskipun para negosiator sudah mendapatkan kesan saling percaya satu sama lain, para petinggi atau elit dari tiap pihak tidak merasakan hal yang sama. Maka dari itu diperlukan keterlibatan dari *Decision Makers* dari berbagai aspek (*elite and political, security, economic and social*). Seperti yang telah dilakukan India dan China yang melibatkan para pejabat Negara dalam proses negosiasi serta pertemuan antar kedua Negara sebelum India tergabung dalam SCO dan pasca India resmi menjadi anggota SCO
3. *Wider Constituencies*, diluar *negotiator* dan *decision makers* termasuk dalam kategori ini. Aktor ini merupakan pihak ketiga yang mengalami dampak dari negosiasi dan yang akan membutuhkan keyakinan untuk mendukung terjadinya perjanjian perdamaian.

Setelah memahami pengertian dari CBM perlu juga memahami jenis jenis dari CBM agar dapat mengambil langkah yang tepat dan efektif dalam penanganan sebuah konflik. CBM terbagi menjadi empat jenis antara lain (Simon & Siegfried, 2013) :

1. *Political CBM*

Political CBM merupakan CBM yang mempunyai tujuan secara strategis untuk menciptakan kepercayaan antar pihak yang berkonflik agar timbul

solusi secara politis. Kedua pihak diharapkan untuk berada dalam satu lingkup atau forum yang sama baik sifatnya formal atau informal yang bertujuan membantu menciptakan atmosfer yang lebih baik dan bersahabat. Pada pelaksanaan CBM ini actor yang terlibat tidak hanya sebatas *negotiator* bahkan elit politik (*decision makers*) juga dapat terlibat langsung, misalnya kunjungan terhadap masing masing pihak oleh elit politiknya.

2. *CBM in the Security Sector*

CBM ini focus terhadap masalah konflik yang berkaitan dengan bidang militer. Umumnya konflik ini terjadi karena adanya kesalahpahaman atas suatu tindakan militer dari salah satu pihak. CBM ini bertujuan untuk memperjelas intensi atau tujuan dari suatu aktifitas militer sehingga pihak yang terlibat mempunyai perhitungan rasional sebelum melakukan aktifitas militer atau dalam menanggapi aktifitas militer dari pihak lain. Hal ini dapat terjadi jika ada suatu perjanjian mengenai batasan batasan terkait bidang militer baik dalam tindakan maupun instrumennya. Dalam pelaksanaannya CBM ini dapat juga berupa kerjasama militer seperti latihan militer gabungan dan monitoring kegiatan militer bersama. Dengan meningkatnya keamanan melalui CBM ini maka akan muncul potensi yang signifikan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan membantu mengembangkan hubungan antar pihak yang berkonflik

3. *Economic and environmental CBM*

CBM jenis ini focus terhadap usaha usaha kerjasama ekonomi dan aktifitas lainnya yang berkaitan dengan manajemen sumber daya dan permasalahan lingkungan. Misalnya dengan membuka jalur perdagangan antar kedua pihak yang dapat meredakan ketegangan dan mendatangkan keuntungan bagi keduanya. Kerjasama dalam ekonomi sering kali menjadi langkah awal dari proses CBM ditengah konflik yang terjadi.

4. *Social, humanitarian and cultural CBM*

CBM *humanitarian* ini seringkali dilakukan sebelum proses negosiasi dimulai. Jika pihak yang berkonflik sepakat akan prinsip kemanusiaan maka hal tersebut sudah menandakan bahwa bahwa negara-negara tersebut sama sama menganut norma internasional yang ada sehingga tidak menutup kemungkinan adanya opsi untuk melakukan penyelesaian konflik secara politis atau bahkan pada tahap negosiasi. Contohnya dengan melakukan pertukaran tahanan antar kedua pihak, adanya gencatan senjata yang menunjukkan kesiapan untuk mengambil pendekatan alternatif dalam sebuah konflik. Sedangkan pada *social & cultural CBM* merupakan proses CBM pada level social dan budaya. hal yang paling menonjol pada CBM ini adalah pada actor yang terlibat lebih mengarah pada *wider constituencies* yaitu pihak yang terdampak dari konflik tersebut. Contohnya adanya kunjungan keluarga seperti yang terjadi pada Korea Utara dengan Korea Selatan, adanya pertukaran pelajar antar kedua pihak serta penyelenggaraan kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan bersama. Jenis CBM ini biasanya dilakukan setelah negosiasi untuk membangun kepercayaan atau untuk mempertahankan kepercayaan dari masing masing pihak.

Dari semua jenis CBM yang sudah dijelaskan perlu diketahui bahwa tiap sektornya dapat saling berkaitan dan dapat diaplikasikan secara bersamaan. Hal tersebut akan lebih memaksimalkan pencegahan dan penanganan konflik. Dalam kasus Konflik India dan China CBM yang digunakan merupakan *Political CBM*. Keputusan India bergabung dengan SCO di mana India dan China tergabung dalam satu forum yaitu SCO yang merupakan sebuah organisasi keamanan regional untuk melakukan pertemuan dan tukar pendapat di tengah hubungan diplomatik yang buruk antar kedua negara tersebut yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masing masing *decision makers*.

Selanjutnya adalah kapan CBM dapat digunakan. Pada dasarnya CBM dapat diaplikasikan dalam seluruh proses untuk mencapai perdamaian namun bentuk dan

fungsinya juga akan berubah sesuai waktu yang dipilih dalam prosesnya. Terdapat tiga waktu penerapan CBM menurut Simon J. A. Mason yaitu (Simon & Siegfried, 2013):

1. CBM sebelum proses perdamaian dimulai dan sebelum negosiasi terwujud. Dalam waktu ini CBM sudah dapat diterapkan meskipun tanpa harus terfokus untuk menggunakannya dengan tujuan menginisiasi sebuah negosiasi namun hanya bertujuan untuk membangun jebatan hubungan dari pihak yang terlibat konflik dan meminimalisasi dampak buruk dari konflik tersebut. Dalam fase ini CBM yang digunakan biasanya lebih bersifat tidak mengikat dan mengarah pada kebijakan yang tidak berbau politik maupun militer, misalnya mempertimbangkan tindakan humanitarian yang tentu disepakati tiap pihak (*humanitarian CBM*), *economic CBM* misalnya dengan membuka akses perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. Dengan adanya kedua CBM tersebut akan dapat juga meningkatkan pentingnya CBM yang lain seperti *political* dan *security CBM* sehingga pihak yang berkonflik akan mempertimbangkan sebuah negosiasi untuk menyelesaikan konfliknya karena urgensi yang ada
2. CBM selama proses negosiasi. Dalam fase ini CBM berfungsi untuk mendorong proses negosiasi di mana sebuah perjanjian awal tentang hal hal yang mendasar sudah terbentuk sebelum adanya isu utama untuk dibahas. CBM yang digunakan pun bersifat mendukung proses negosiasi sesuai dengan permasalahan yang menjadi penyebab konflik. Dalam tahap inilah letak SCO yang diharapkan dapat membangun CBM antara India dan China di tengah hubungan politik yang buruk dengan antar kedua negara dimana terdapat berbagai masalah yang kompleks mulai dari permasalahan perbatasan hingga masalah sumber air. Hal ini dimungkinkan karena adanya sarana komunikasi yang teratur, dengan SCO sebagai pihak ketiga serta pola interaksi baru antar kedua negara .

3. CBM selama proses implementasi. Pada proses ini CBM dapat digunakan untuk menjaga dan meningkatkan tingkat rasa saling percaya antar pihak yang terlibat. Rasa percaya tersebut sebagai modal yang vital serta sebagai bentuk jaminan eksternal untuk implementasi dan memperkuat perjanjian perdamaian yang sudah disepakati. Meskipun tidak dampaknya tidak terasa secara langsung namun CBM yang ada dapat membantu pihak yang terlibat untuk menjalani konsekuensi dari perjanjian perdamaian yang ada. Selama prosesnya berkembang, bentuk CBM secara umum berubah dari yang sifatnya tidak mengikat menjadi secara politis bersifat mengikat atau bahkan menjadi secara legal mengikat pihak yang berkonflik tersebut secara seimbang atas intensi baik dari masing-masing pihak.

Dalam menganalisis permasalahan ini penulis juga akan menggunakan perspektif Neo Liberalis Institusionalisme. Menurut Koehane negara dalam organisasi regional memiliki tujuan untuk memperluas konsepsi kepentingan nasionalnya dalam rangka memperluas wilayah kerjasama. Aturan yang tercipta dalam lembaga ini mencegah definisi kepentingan nasional yang sempit dan mengurangi klaim kedaulatan yang mutlak (Hara A. E., 2011). Teori ini merupakan pandangan optimis dalam politik internasional meskipun asumsinya mengakui dan menerima asumsi utama yang mendorong pada pendekatan realis yaitu bahwa dunia internasional bersifat anarkis dan bahwa perilaku negara masih didorong oleh kepentingan nasionalnya masing-masing. Namun dalam kondisi anarkis tersebut kaum neoliberal berpendapat bahwa bentuk kerjasama masih dimungkinkan terjadi. Teori ini juga berpendapat bahwa dunia internasional dapat mencapai suatu keteraturan global dengan cara adanya *network of rules* atau jaringan peraturan, norma dan institusi yang dapat menengahi persaingan antar negara serta mengurangi penggunaan cara kekerasan oleh negara-negara yang mengejar kepentingannya (Hara A. E., 2011, pp. 64-65).

Bagi neo liberalis institusionalisme, institusi memiliki peran penting dimana terdapat sistem serta berbagai macam peraturan yang bertujuan untuk mengawasi

pesilaku anggotanya. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa institusi ditujukan untuk memfasilitasi kerja sama dengan meningkatkan transparansi serta kepercayaan. Dengan demikian dapat mengurangi ketidakpastian motif dan niat aktor lain yang menurut pandangan realisme merupakan penghambat adanya kerja sama. Institusi juga menyediakan informasi yang membentuk perhitungan rasional sehingga memungkinkan aktor menetapkan probabilitas bagaimana actor lain berperilaku atau bertindak untuk mendapatkan keuntungan, informasi tersebut juga menunjukkan bahwa anggota sebuah institusi menunjukkan adanya kesamaan tujuan atau kepentingan bersama dalam kerja sama jangka panjang (Keohane R. O., 1989, p. 1).

Dalam konteks permasalahan konflik India dan China teori ini dapat menjawab alasan India bergabung dengan SCO. Seperti yang diketahui kedua negara ini mengalami pasang surut hubungan diplomatik. Meskipun pada awalnya kedua Negara ini merupakan Negara yang bersahabat namun dalam perkembangannya kedua negara ini sempat terlibat dalam konflik terbuka. India dan China juga bersaing dalam pengaruhnya di kawasan Asia Selatan. Dengan bergabungnya India dalam SCO yang merupakan organisasi regional yang dimotori oleh China ini menunjukkan adanya kepentingan yang ingin dicapai oleh India melalui organisasi regional tersebut. SCO sebagai institusi yang menaungi Kedua Negara ini akan menyediakan informasi yang membentuk perhitungan rasional bagi India dalam menjalankan politik luar negerinya guna mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

1.6 Argumen Utama

India bergabung dengan SCO untuk menambah jalur komunikasi dengan China dan negara-negara anggota lainnya agar tercipta *confidence building (Political CBM)* yaitu membangun kepercayaan di antara negara anggota SCO dengan tujuan mencapai solusi politis seperti mengurangi tensi konflik. Hal ini akan mendorong adanya kerjasama yang lebih luas antara India dengan China dan anggota SCO lainnya agar India dapat mencapai keuntungan dari bergabungnya dengan SCO.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menulis sebuah karya ilmiah dengan mengumpulkan informasi serta data yang kemudian dianalisis sesuai dengan pertanyaan yang ada pada rumusan masalah yang ada sehingga dapat diolah menjadi sebuah karya tulis. Metode ini juga menentukan jenis data yang dibutuhkan, sumber data yang diambil dan bagaimana data itu akan diolah selanjutnya.

1.7.1 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data sangat penting dalam penulisan karya tulis karena dapat menentukan jenis dan sumber data yang akan diolah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dimana tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, motif suatu perilaku dan tindakan. Terdapat dua jenis sumber data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif yaitu berupa kata-kata dan tindakan yang berasal dari wawancara, foto, rekaman, pengamatan dan dokumentasi baik pribadi maupun resmi (Moleong, 1995, p. 113)

data yang digunakan pun merupakan data skunder yang artinya peneliti tidak mengamati secara langsung terhadap subjek penelitian melainkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan pihak lain. (Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 1995) Dari pengertian di atas maka penulis menggunakan sumber informasi untuk mendapatkan data yang sesuai antara lain :

1. Perpustakaan Universitas Jember
2. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Buku, Jurnal ilmiah, Artikel
4. Jurnal dan buku elektronik
5. Media Internet

1.7.2 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, motif suatu perilaku dan tindakan yang dilakukan. Maka peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menganalisis fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional dengan cara menelaah semua data yang ada untuk kemudian diteliti.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam usaha mempermudah penulisan karya ilmiah ini, peneliti akan membaginya kedalam lima bab dimana pada setiap bab akan terdiri dari sub bab yang saling berhubungan. Sistematika penulisan dari bab-bab tersebut sebagai berikut :

Bab 1. Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab 2. Dinamika Hubungan Politik India dan China

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang dinamika hubungan India dan China sebelum India tergabung dalam SCO.

Bab 3. *Shanghai Cooperation Organization*

Dalam bab ini penulis menjelaskan lebih lanjut tentang SCO sehingga India memutuskan untuk bergabung

Bab 4. Alasan India Bergabung dalam *Shanghai Cooperation Organization* di tengah Konfliknya dengan China

Dalam bab ini berisi penjelasan tentang alasan India tergabung dalam SCO sesuai dengan konsep dan teori serta keuntungan yang didapat oleh India dengan bergabung dalam SCO

Bab 5. Kesimpulan

Dalam bab ini memuat kesimpulan yang diambil oleh penulis dari pembahasan pada bab – bab sebelumnya dan sekaligus merupakan penutup dari serangkaian karya ilmiah ini



BAB 2. DINAMIKA HUBUNGAN POLITIK ANTARA INDIA DAN CHINA

Bab ini akan menjelaskan mengenai dinamika hubungan antara India dan China. Kedua negara ini tidak pernah memiliki hubungan yang benar benar baik bahkan sampai melibatkan konflik bersenjata. Hal ini tidak terlepas dari isu perbatasan antar kedua Negara yang bahkan sampai saat ini belum menemui titik kesepakatan. Dengan adanya isu perbatasan, permasalahan antar kedua negara semakin meluas pada permasalahan sumber daya, hubungan diplomatic dengan negara sekitar dalam kaitan persaingan pengaruh negara masing masing di kawasan regional.

2.1 Dinamika Hubungan Diplomatik India dan China

Hubungan antara India dan China memang terkesan cukup buruk namun berdasarkan sejarahnya kedua negara ini mengalami pasang surut hubungan diplomatic. Yang awalnya bisa dianggap sebagai negara yang saling mengerti atas dasar latar belakang sejarah dan ideologi, lalu mulai munculnya ketegangan yang sampai melibatkan konflik bersenjata, munculnya potensi konflik baru hingga muncul potensi kerja sama diantara kedua Negara tersebut.

2.1.1 Awal Mula Hubungan Diplomatik India dan China

Pada awalnya, sejak kemerdekaan Republik India dan pembentukan China pada tahun 1949 hubungan kedua negara ini cukup baik bahkan salah satu kebijakan pemerintah India adalah menjaga hubungan baik dengan Cina (IndiaToday.in, 2016) . Hubungan baik ini tidak lepas dari latar belakang sejarah dan ideologi. Pengakuan atas *People's of Republic of China* (PRC) pada bulan Desember 1949 oleh India, menjadikan mereka negara kedua di dunia yang melakukannya setelah Burma. Pemberian legitimasi ini sangat membantu membangun lingkungan kerja sama dengan Cina, sebaliknya banyak negara memilih untuk mengakui *Republic of China*

(ROC) pada Taiwan. Selanjutnya, keberadaan India sebagai Negara sosialis dan bukan negara kapitalis, memungkinkan kedua Negara melakukan kerja sama yang lebih besar karena India tidak langsung bertentangan dengan ideologi Maois seperti Amerika yang juga merupakan pesaing China di dunia Internasional. Atas dasar keselarasan diplomatik dan ideologis inilah Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru mencoba merevolusi kebijakan internasional dengan memproduksi Perjanjian Panchsheel antara China dan India pada tahun 1954. Perjanjian Panchsheel menekankan lima poin yaitu :

1. saling menghormati integritas dan kedaulatan wilayah masing-masing
2. Non-agresi
3. Tidak ada gangguan dalam urusan domestic masing-masing
4. Kesetaraan dan saling menguntungkan
5. Perdamaian yang konsisten (Abitbo, 2009).

Perjanjian ini berasal dari Optimisme Nehru bahwa negara-negara pascakolonial dapat meruntuhkan bipolarisme dunia.

Alasan diplomatik dan ideologis untuk kerja sama China-India didukung oleh rasa berbagi pengalaman sejarah. Baik China dan India berbagi budaya yang dan tradisi sejarah yang panjang. Kedua negara pernah menjadi Negara dengan kekuatan besar di masa lalu. Keduanya Negara juga sama-sama diserang oleh imperialis Barat dan dihina dan dieksploitasi. Pendudukan dan eksploitasi oleh Barat ini menyebabkan tumbuhnya kekuatan nasionalis yang signifikan di India dan China serta keinginan untuk mendapatkan kemerdekaannya sendiri. Hingga pada akhirnya ROC menerima independensinya pada 1912, dan kemudian konsolidasi RRC pada 1949 mengantarkan era baru kedaulatan dan kemerdekaan China dari imperialisme. Demikian juga, India mencapai kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1947. Perekonomian Cina dan India sebagian besar masih berasal dari bidang agraris dan tergantung pada impor barang jadi. Hal ini menyebabkan pemerintah India untuk menerapkan bentuk sosialisme demokratis, sedangkan China bergerak di bidang agrarian berbasis komunisme atau Maoisme. Terlepas dari perbedaan sistem mereka,

kedua negara ini sama sama tidak menyukai kapitalisme yang menciptakan persamaan landasan ideologis (Abitbo, 2009).

2.1.2 Terjadinya Konflik antara India dan China

Seiring berjalannya waktu hubungan antara India dan China yang awalnya merupakan kerabat dekat mulai mengalami gesekan, kedua negara ini sudah mengalami insiden sebanyak tiga kali sejak tahun 1962 sampai yang terakhir pada tahun 2017.

a. Sino Indian War 1962

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyulut dalam pecahnya perang antara India dan China. Ketegangan antara India dan China mulai muncul atas masalah Invasi China pada Tibet tahun 1950. Ketakutan atas perebutan Tibet oleh RRC didasarkan pada gagasan tentang hubungan India-Tibet yang bersejarah. Tetapi setelah adanya perjanjian Tujuh Belas Poin pada bulan Mei 1951 menyelesaikan perbedaan pendapat ini dengan hasil India mengakui kedaulatan sejarah Tiongkok atas Tibet sambil tetap memelihara kepentingan ekonomi dan sosial India di Tibet.

Selanjutnya masalah meluas pada masalah perbatasan China dengan India di Timur Laut dan Barat Laut. Namun pada akhirnya kedua negara setuju untuk meninggalkan permasalahan tersebut untuk dimediasikan di kemudian hari yang membuka jalan pada perjanjian Panchsheel tahun 1954. Hubungan kedua Negara kembali bergolak ketika China mengungkit masalah perbatasan Sino-India di selatan Garis McMahon pada tahun 1957 dimana terdapat selisih paham atas masalah perbatasan kedua negara. Permasalahan ini merujuk pada Konvensi Simla 1914 antara Inggris dan Tibet menetapkan Garis McMahon sebagai perbatasan resmi antara India yang dikuasai Inggris dan Cina, yang menyangkal hak Cina atas Tibet. Ketika India memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1947, India mewarisi seluruh perjanjian teritorial dari Inggris, dan dengan demikian mewarisi Garis McMahon sebagai perbatasan antara dan Cina. Atas dasar keyakinan India pada

keabsahan garis McMahon yang berasal dari konvensi Simla tahun 1914, serta sejumlah peta India Britania dengan garis yang menggambarkan bagian utaranya. Nehru mengabaikan desakan Cina dalam negosiasi perbatasan selama tahun 1954. Namun terlepas dari pandangan India tentang legitimasi Garis McMahon, Cina tidak menandatangani Konvensi Simla dan dalam kondisi apa pun tidak menyetujui perjanjian bilateral apa pun antara Tibet dan Inggris karena dianggap melanggar kedaulatan mereka (Abitbo, 2009).



Gambar 2.1 Peta McMahon Line

Sumber : South-Asian territorial claims

Dari gambar 2.1 dapat dilihat garis McMahon yang menjadi acuan klaim India melalui kawasan Arunachal Pradesh yang juga diklaim oleh China sehingga menimbulkan perselisihan diantara kedua Negara tersebut. (The Economist, 2019)

Dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1959 terjadi pemberontakan besar besaran oleh Tibet terhadap otoritas China sehingga otoritas China harus masuk sampai ibu kota Lhasa untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Dalam pemberontakan tersebut yaitu pada 31 Maret 1959, Dalai Lama melarikan diri dari Tibet ke India dan mendapatkan suaka politik (Abitbo, 2009). Pemimpin Republik Rakyat Tiongkok, Mao Zedong merasa terhina oleh penerimaan yang diperoleh Dalai Lama di India ketika ia melarikan diri ke India, hal ini dianggap sebagai campur tangan dalam urusan domestik Cina. Ketegangan pun meningkat antara kedua negara ketika Mao menyatakan bahwa pemberontakan Lhasa di Tibet disebabkan oleh India (IndiaToday.in, 2016). Pemberontakan Tibet dikombinasikan dengan pernyataan Cina atas perbatasan pada tahun 1957 adalah faktor utama yang berkontribusi paling besar atas hubungan India dan China hingga pecahnya perang pada tahun 1962.

b. Insiden Nathu La dan Cho La 1967

Selama perang India-Pakistan 1965, masih ada tekanan dari China terhadap India, tetapi pertempuran Nathu La dipandang sebagai bentrokan besar pertama antara China dan India sejak perang 1962 (Madan, 2017). Menurut catatan dari dalam pertikaian itu lebih dari 80 tentara India terbunuh, sementara perkiraan mengatakan antara 300 hingga 400 tentara China terbunuh. Penyebab insiden ini didasari atas kekesalan China pada kehadiran Angkatan Darat India di Kerajaan Sikkim saat itu. Pada saat itu wilayah Doklam sedang diperebutkan oleh China dan Bhutan, sehingga menyebabkan China keberatan dengan kehadiran Angkatan Darat India di Bhutan. Pemerintah China menganggap bahwa Bhutan adalah "negara yang berdaulat" dan tidak ada "pihak ketiga" yang boleh ikut campur (Krishnan, 2017).

Pada tanggal 13 Agustus 1967, pasukan China mulai menggali parit di Nathu La di seberang perbatasan India. Setelah pasukan India mengamati bahwa beberapa parit berada di dalam Sikkim, mereka meminta komandan Cina setempat untuk menarik diri dari negara yang pada waktu itu merupakan daerah perlindungan India (Chaudhury, 2018). Pertikaian dimulai ketika kawat besi panjang dipasang dari

Nathu La ke Sebu La di sepanjang perbatasan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak di bawah perjanjian antara Inggris dan Dinasti Qing China pada tahun 1890. Namun China keberatan dengan peletakan kawat tersebut dan beberapa hari kemudian China melakukan serangan dengan tembakan senapan mesin sedang dari bagian utara perbatasan. Meskipun tidak mudah namun pada akhirnya gencatan senjata pun terjadi. Dua puluh hari kemudian pada tanggal 1 Oktober 1967 pertikaian kembali muncul, terjadi pertempuran antara India dan Cina di wilayah Cho La, sebuah jalan lain di perbatasan Sikkim-Tibet beberapa kilometer di utara Nathu La dan pada akhirnya dimenangkan oleh India dan memaksa China untuk mundur (Krishnan, 2017).

c. Konflik Doklam, Bhutan 2017

Konflik dimulai pada pertengahan Juni 2017, ketika Bhutan mengetahui adanya personil China yang berusaha untuk membangun jalan di dataran tinggi Doklam (Woody, 2018). Doklam adalah daerah yang disengketakan antara Cina dan Bhutan yang merupakan dataran tinggi dan lembah yang terletak di perbatasan Bhutan-China, dekat India. Posisi geografis Doklam menjadikannya area strategis yang penting karena terletak di antara lembah Chumbi Tibet di sebelah Utara, lembah Ha di Bhutan di sebelah Timur, dan negara bagian Sikkim di India di sebelah Barat.

Atas tindakan China tersebut Bhutan meminta bantuan pada India untuk memblokir pembangunan jalan yang dilakukan China karena mereka menganggap tindakan tersebut mengancam kepentingan nasionalnya. India sendiri membantu Bhutan bukan tanpa alasan, kedua Negara sudah menandatangani perjanjian persahabatan yang memungkinkan India untuk turut campur tangan dalam kepentingan Bhutan (Desk, 2018). Di sisi lain China mengklaim bahwa pembangunan yang dilakukannya berada dalam teritorilanya sendiri dan merasa tidak seharusnya India turut campur dalam permasalahan tersebut. Hingga akhirnya pasukan Cina dan India saling berhadapan dalam jarak yang cukup dekat. Ratusan pasukan dari masing-masing pihak diyakini tersusun di sekitar lokasi pembangunan. Sekitar 3.000

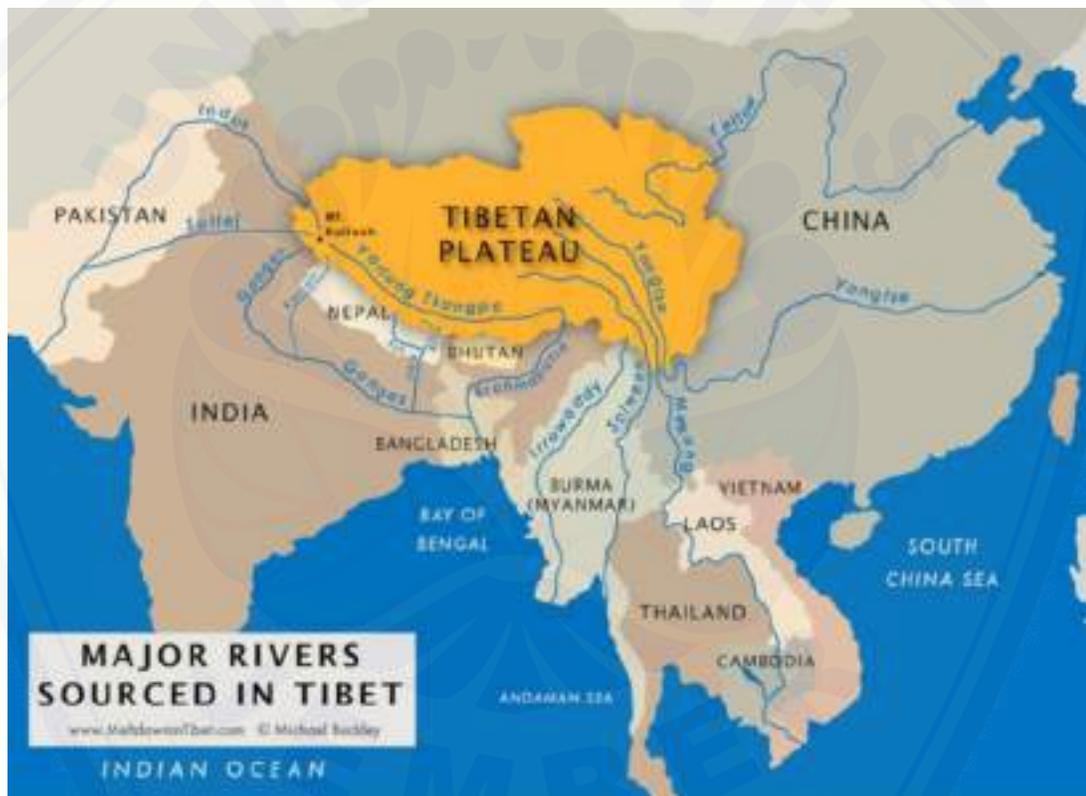
tentara dari masing-masing negara diperkirakan berada di area umum di sekitar Doklam. Unit militer lain juga diperkirakan berada di daerah itu, meskipun jumlah pastinya tidak jelas, terutama untuk pasukan China. Kebuntuan pun meningkat dari hari ke hari dimana China melakukan latihan militer di Tibet tak lama setelah ketegangan dimulai. Sedangkan pasukan India memperkuat posisi mereka dengan membangun bunker, membawa artileri dan tank ringan, dan meletakkan ranjau darat untuk menghadapi potensi serangan Cina. Namun kedua belah pihak memilih untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan di Doklam. Setelah melalui negosiasi, konfrontasi pun berakhir pada tanggal 28 Agustus 2017, ketika India dan China menyetujui penarikan pasukan masing-masing (Woody, 2018).

Meskipun demikian sampai saat ini status Doklam masih tidak jelas karena kedua pihak memiliki klaim tersendiri. India menganggap mengenai masalah pertikaian terjadi karena China mencoba mengubah status-quo yang ada. Hal ini disampaikan oleh duta besar India untuk China, Gautam Bambawale pada tanggal 24 Maret 2018. Sebagai reaksinya, pada tanggal 26 Maret 2018, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan bahwa Doklam adalah milik Cina karena mereka memiliki konvensi bersejarah. China juga mengklaim bahwa kegiatannya di daerah itu berada dalam hak kedaulatannya dan tidak ada perubahan status quo (Achom, 2018).

2.1.3 Potensi Konflik India dan China

Adanya kelangkaan air dapat dikaitkan dengan terjadinya konflik bersenjata. Meskipun sementara ini kedua negara belum menyatakan bertarung secara eksklusif atas akses terhadap air, adanya kelangkaan air jika dikombinasikan dengan faktor-faktor lain seperti posisi hulu-hilir, hubungan kedaulatan, dan ketidakstabilan politik dapat beresiko menyebabkan perang. Faktor-faktor pendorong yang menghubungkan keamanan air dengan kemungkinan perang antara Cina dan India antara lain, yang pertama adalah kelangkaan air China yang meningkat. Dataran tinggi Tibet di Cina

yang terletak di Himalaya adalah sumber dari 7 sistem sungai utama di Asia, antara lain Yellow, Yangtze, Indus, Sutlej, Brahmaputra, Salween, dan Mekong. Bahkan seringkali Tibe disebut sebagai "Menara Air Asia." Sungai-sungai ini melintasi 11 negara dan yang membentang dari Afghanistan ke India di wilayah Asia Selatan dan ke Vietnam di wilayah Asia Tenggara. Karena posisinya di hulu, Cina menikmati monopoli potensial atas pasokan air bersih untuk sebagian besar Asia Selatan dan Tenggara. Dalam kasus India aliran air tersebut melewati Sungai Indus dan Brahmaputra. (Pak, 2016)



Gambar 2.2 Peta Aliran Sungai Dataran Tinggi Tibet

Sumber : Major Rivers Sourced In Tibet

Dari gambar 2.2 dapat dilihat aliran air dari dataran tinggi Tibet melalui 10 sistem sungai di Asia termasuk sungai Yarlung Tsangpo China yang oleh India disebut sungai Brahmaputra (Burkett, 2018).

Sedangkan pada faktanya China sendiri mengalami masalah krisis meskipun kaya akan air di Tibet. Krisis air yang muncul semakin diperparah oleh penggunaan berlebihan dan polusi. Bahkan pada 2004, air per kapita Cina yang tersedia adalah salah satu yang terendah di Asia. Tidak hanya masalah polusi, masalah air China juga memiliki dimensi permasalahan regional kebanyakan sumber air China dominan berada di wilayah selatan sedangkan kebutuhan air lebih tinggi pada wilayah utara China. Sekitar 45 persen penduduk Cina dan 60 persen dari pertaniannya berada di utara, wilayah ini hanya mendapat 13,8 persen dari sumber air bersih yang ada. Dalam istilah per kapita, jumlah air yang tersedia di wilayah utara hanya sekitar 25 persen dari yang tersedia di wilayah selatan. Untuk memperbaiki kesenjangan air tersebut, Cina memulai Proyek pengalihan air dari Selatan-Utara secara besar-besaran untuk mentransfer total 38 hingga 48 miliar meter kubik air per tahun. Pada tahun 2002 Dewan Negara China mengumumkan secara resmi bahwa proyek ini akan melakukan pengalihan perairan sepanjang tiga rute yang berbeda yaitu rute timur, rute tengah, dan rute barat. Proyek pengalihan air di sepanjang dua rute pertama sudah selesai dan mentransfer air dari Yangtze dan Sungai Han di selatan ke sungai Kuning di utara. Sedangkan rute ketiga masih dalam pengembangan, rute ini akan mengalihkan anak sungai di bagian hulu sungai Yangtze di Cina barat ke sungai Kuning. Namun, dalam 30 tahun terakhir muncul usulan baru untuk mengalihkan air dari bagian hulu Sungai Mekong, Salween, dan Yarlung Tsangpo dan sungai-sungai lain yang mengalir dari Tibet.

India memandang rencana pengalihan tambahan ini dengan sangat hati-hati karena akan memengaruhi aliran air ke hilir Sungai Brahmaputra, sungai yang mengalir melintasi perbatasan India. Sungai Brahmaputra memegang kepentingan khusus bagi India. Pertama, jumlahnya hampir 29 persen dari semua air permukaan di sungai-sungai India. Kedua, sungai ini mencakup kira-kira 44 persen dari total potensi tenaga air India. Tentu saja aktivitas hulu China akan mengurangi aliran air dan tenaga air India yang diharapkan didapat dari Sungai Brahmaputra. Mengingat populasi India diperkirakan akan tumbuh 500 juta pada tahun 2050. Tidak

mengerankan proyek pengalihan air China adalah masalah serius bagi India. Meskipun sejauh ini pemerintah China belum secara resmi menyetujui rencana untuk mengalihkan sungai Yarlung Tsangpo, India tetap khawatir tentang niat China di masa depan. Sementara itu, China secara resmi mengumumkan rencana untuk membangun lima bendungan besar di Sungai Yarlung Tsangpo dengan tujuan menghasilkan pembangkit listrik tenaga air, bukan pengalihan air. Pada tahun 2014, pembangunan bendungan Zangmu telah rampung dan menjadi bendungan pembangkit listrik tenaga air pertama di sepanjang Sungai Yarlung Tsangpo. Namun bagi India muncul kecurigaan bahwa pembangunan bendungan tenaga air ini adalah langkah pertama dalam proses untuk membangun tambahan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengalihkan air sesuai dengan (GWWD) Grand Western Water Diversion Plan.

Permasalahan air di daerah sungai Yarlung Tsangpo China yang oleh India disebut sungai Brahmaputra berada di daerah yang disebut Arunachal Pradesh. Baik Cina dan India sama sama mengklaim wilayah ini. Sengketa teritorial ini lebih sensitif karena terkait dengan kedaulatan kedua negara. Cina tidak dapat menyerahkan klaimnya tanpa secara bersamaan melemahkan klaimnya atas kedaulatan Tibet, yang diambil dengan paksa pada tahun 1950. Bagi India, Arunachal Pradesh adalah tempat kekalahan memalukan atas Cina pada tahun 1962 dalam perang Sino India. Sedangkan dari perspektif China, kontrol politik atas Tibet adalah masalah kedaulatan, integritas wilayah, dan keamanan (Pak, 2016).

2.1.4 Potensi Kerjasama antara India dan China

Meskipun India dan China mempunyai hubungan diplomatik yang kurang baik namun kedua negara ini mempunyai potensi kerja sama terutama dalam bidang ekonomi. Baru baru ini India melakukan penolakan atas rancangan ekonomi China. berdasarkan pernyataan wakil ketua NITI (*National Institution of Transforming India*) Aayog Rajiv Kumar bahwa India telah menolak tawaran China untuk

bergabung dalam rancangan ekonomi China yaitu *Belt and Road Initiative* (BRI) untuk membuat jalur sutra atau jalur perdagangan internasional (Patranobis, 2018). BRI adalah program ambisius China untuk menghubungkan Asia dengan Afrika dan Eropa melalui jaringan darat dan maritim di sepanjang enam koridor dengan tujuan meningkatkan integrasi regional, meningkatkan perdagangan dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Rancangan Jalur perekonomian ini diciptakan pada 2013 oleh Presiden China Xi Jinping, yang mendapat inspirasi dari konsep Jalan Sutra yang didirikan pada Dinasti Han 2.000 tahun lalu yaitu jaringan kuno rute perdagangan yang menghubungkan Tiongkok ke Mediterania melalui Eurasia selama berabad-abad (European Bank for Reconstruction and Development, 2019). Salah satu jalurnya akan melalui wilayah Kashmir yang merupakan wilayah sengketa antara India, Pakistan dan sebagian wilayah China Pakistan Occupied Kashmir (PoK) yang disebut koridor ekonomi China-Pakistan. Tentu saja hal ini dianggap India akan melanggar kedaulatan negaranya (Patranobis, 2018). Meskipun sampai saat ini belum terdapat adanya kesepakatan akan masalah ini namun isu tersebut justru akan membuka peluang bagi kedua negara ini untuk saling bekerja sama satu sama lain di masa yang akan datang.

Dalam bidang keamanan sebenarnya kedua negara ini juga sudah tegabung dalam suatu forum yang sama yaitu *ASEAN Regional Forum* (ARF) sebagai mitra dialog. Organisasi ini adalah forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 sebagai sarana dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik dan keamanan di kawasan ini, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara peserta ARF untuk meminimalkan ancaman, menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, dengan ASEAN sebagai pendorong utama dalam ARF. ARF setuju bahwa konsep keamanan komprehensif tidak hanya mencakup aspek militer dan masalah keamanan tradisional, tetapi juga berkaitan dengan masalah politik, ekonomi, sosial dan lainnya seperti masalah keamanan non-tradisional. Peserta ARF berjumlah 27 negara yang terdiri dari semua negara anggota ASEAN (Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar,

Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina), 10 negara Mitra Bicara ASEAN (Amerika Serikat, Kanada, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru, dan Uni Eropa) dan beberapa negara di kawasan ini, yaitu: Papua Nugini, Mongolia, Korea Utara, Pakistan, Timor-Leste, Bangladesh, dan Sri Lanka. (Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia, 2019). India bergabung dalam forum ini pada tahun 1996 (Ministry of External Affairs Government of India, 2012) sedangkan China terlebih dahulu bergabung pada tahun 1994 (Bentham, 2018). Meskipun adanya keterlibatan India dan China dalam forum keamanan ini munculnya konflik dalam kasus Doklam pada tahun 2017 menunjukkan masih adanya selisih paham diantara kedua negara tersebut. Sama dengan potensi kerja sama dalam bidang ekonomi, fakta ini juga menunjuk kan bahwa India dan China tidak menutup kemungkinan akan adanya potensi untuk kerja sama lebih lanjut dalam bidang keamanan.

2.2 Hubungan Diplomatik India dan China dengan Negara Tetangga Dalam Persaingan Pengaruh di Kawasan Asia Selatan

Berdasarkan sejarah yang terjadi, hubungan India dengan Negara sekitarnya dan hubungan China dengan Negara sekitarnya terdapat pola yang cukup unik. Pola itu dapat dilihat dari beberapa rangkaian konflik yang melibatkan kedua negara tersebut. Yang pertama yaitu pada konflik India dengan Pakistan. Terdapat konflik perbatasan yang berkepanjangan antar kedua Negara tersebut. Sumber konflik antara India dan Pakistan merupakan perebutan wilayah yang merupakan buntut sejarah panjang hubungan kedua Negara yang bertetangga ini. Wilayah yang diperebutkan kedua belah pihak tersebut bernama Kashmir yang terletak di sebelah utara India dan Pakistan. Kedua Negara tersebut telah memperebutkan wilayah Kashmir semenjak mereka mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1947 (Hunt, 2017). Sejauh ini India dan Pakistan telah bertempur dalam tiga perang satu sama lain sejak tahun 1947 dan 1965. Bahkan setelah kedua negara menjadi negara berkekuatan nuklir pada tahun 1998, mereka kemudian kembali berperang lagi pada tahun 1999. Kedua negara

telah mempertahankan gencatan senjata yang rapuh sejak 2003, meskipun kedua rival tersebut secara teratur melakukan serangan melintasi perbatasan (Council of Foreign Relations, 2019).

Di sisi lain Cina dan Pakistan telah menikmati hubungan yang erat dan saling menguntungkan. Sejak menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1951, Pakistan adalah salah satu negara pertama yang mengakui Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1950 dan tetap menjadi sekutu yang kuat selama periode isolasi internasional Beijing pada 1960-an dan awal 1970-an. China telah lama memberi Pakistan bantuan militer, teknis, dan ekonomi utama, termasuk transfer teknologi dan peralatan nuklir yang sensitif. Beberapa ahli memperkirakan hubungan yang berkembang antara Amerika Serikat dan saingannya India pada akhirnya akan mendorong Pakistan untuk mendorong hubungan yang lebih dekat dengan mitra keamanan strategisnya, yaitu China.

Bagi Cina, Pakistan dianggap adalah sekutu dengan biaya rendah sebagai *counter* terhadap India. Sedangkan untuk Pakistan, Cina adalah penjamin keamanan bernilai tinggi melawan India. Peran China sebagai pemasok senjata utama untuk Pakistan dimulai pada 1960-an dan termasuk bantuan dalam membangun sejumlah pabrik senjata di Pakistan dan memasok sistem senjata yang lengkap. Pasokan senjata ini membantu Pakistan dalam perangnya melawan India (Afridi & Bajoria, 2010). Cina memberikan bantuan militer ke Pakistan dari tahun 1966 hingga pecahnya krisis Pakistan Timur pada tahun 1971, yang menjadi sumber utama senjata Pakistan. Menurut pengamat Amerika Serikat di Pakistan, selama periode lima tahun dari tahun 1961 hingga 1966, Beijing menyumbangkan peralatan dan pasokan militer senilai lebih dari 130 juta dolar. Seorang juru bicara Pakistan mengungkapkan pada tahun 1971 bahwa RRC telah mengirim 200 instruktur militer ke Pakistan untuk tujuan pelatihan pasukan Pakistan untuk perang gerilya. Selain itu, menurut pengamat Amerika Serikat, di minggu terakhir perang Indo Pak, China memasok 200.000 amunisi anti-pesawat dan amunisi tank untuk Pakistan. Institut Studi Pertahanan India (I.I.D.S. / Indian Institute for Defense Studies) memperkirakan bahwa bantuan senjata

China untuk Pakistan pada tahun 1971-72 terdiri dari 225 tank T-59, satu skuadron pembom II-28, dan empat skuadron MIG-19 pencegat, bersama dengan sejumlah kapal sungai yang tidak teridentifikasi (Farooq, 2010). Setelah pengenaan sanksi dari Amerika Serikat tahun 1990 terhadap Pakistan, China menjadi pemasok senjata terkemuka di negara itu. Selain itu kolaborasi keduanya juga termasuk pelatihan personel, latihan militer bersama, berbagi intelijen, dan upaya kontraterorisme. Bantuan China pada Pakistan sebagai berikut:

1. Rudal: Tentara Pakistan memiliki rudal balistik jarak pendek dan menengah, seperti seri rudal Shaheen, yang menurut para ahli merupakan modifikasi dari impor Cina.
2. Pesawat: Armada Angkatan Udara Pakistan saat ini termasuk pesawat pencegat dan pesawat pelatihan yang canggih milik China, serta sistem radar Peringatan Dini dan Kontrol Udara yang digunakan untuk mendeteksi pesawat. Pakistan memproduksi pesawat tempur multi-peran JF-17 Thunder bersama dengan China yang juga produksi ulang pesawat serang ringan K-8 Karakorum.
3. Program Nuklir: Cina memasok Pakistan dengan teknologi dan bantuan nuklir, termasuk apa yang banyak dicurigai para ahli adalah cetak biru bom nuklir Pakistan. (Afridi & Bajoria, 2010)

Seperti yang sudah dijelaskan di atas dalam konflik yang terjadi antara India dan China, di sisi lain terdapat hubungan baik antara India dan Bhutan. Kedua negara ini sudah menandatangani kesepakatan yang memungkinkan India untuk ikut campur dalam kepentingan Bhutan (Desk, 2018). Adanya perjanjian tersebutlah yang menjadi alasan India ikut terlibat konflik dengan China. Bhutan meminta bantuan pada India karena merasa kepentingan nasionalnya terancam oleh China. Pada mulanya permasalahan ini merupakan konflik antara China dengan Bhutan. Pada pertengahan Juni 2017, Bhutan mengetahui adanya personel China yang berusaha untuk membangun jalan di dataran tinggi Doklam (Woody, 2018). Doklam sendiri adalah daerah yang disengketakan antara Cina dan Bhutan yang merupakan dataran

tinggi dan lembah yang terletak di perbatasan Bhutan-China, dekat India. Posisi geografis Doklam menjadikannya area strategis yang penting karena terletak di antara lembah Chumbi Tibet di sebelah Utara, lembah Ha di Bhutan di sebelah Timur, dan negara bagian Sikkim di India di sebelah Barat. Sedangkan menurut China, pembangunan yang dilakukannya berada dalam teritorilnya sendiri dan merasa tidak seharusnya India turut campur dalam permasalahan tersebut (Woody, 2018).

Meskipun kedua negara ini sempat berhadapan langsung dalam jarak yang cukup dekat bahkan saling melakukan manuver militer hingga ketegangan yang terus meningkat, pada akhirnya setelah melalui negosiasi, konfrontasi pun berakhir pada tanggal 28 Agustus 2017, ketika India dan China menyetujui penarikan pasukan masing-masing (Woody, 2018). Namun sampai saat ini status Doklam masih tidak jelas karena kedua pihak memiliki klaim tersendiri. Pada tanggal 24 Maret 2018, duta besar India untuk China, Gautam Bambawale menyampaikan bahwa India menganggap masalah pertikaian yang ada terjadi karena China mencoba mengubah status-quo sebelumnya. Sebagai reaksinya, pada tanggal 26 Maret 2018, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan bahwa Doklam adalah milik Cina karena mereka memiliki konvensi bersejarah. China juga mengklaim bahwa kegiatannya di daerah itu berada dalam hak kedaulatannya dan tidak ada perubahan status quo (Achom, 2018).

Dari rangkaian peristiwa di atas nampak seolah-olah negara yang menjadi lawan India adalah sekutu bagi China dan lawan dari China adalah sekutu bagi India. Hal tersebut tidak terlepas dari persaingan kedua negara tersebut di kawasan regional. Kedua Negara Nampak memanfaatkan negara di sekitarnya untuk terus terlibat dan menunjukkan eksistensi serta pengaruhnya dalam setiap aktifitas di kawasan demi kepentingan nasionalnya masing-masing.

BAB 3. SHANGHAI COOPRATION ORGANIZATION

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum SCO, sejarah terbentuknya organisasi serta peran-peran yang dilakukan SCO sebagai organisasi regional. Hal tersebut diperlukan untuk memahami apa sebenarnya SCO dan signifikansinya sehingga India memutuskan untuk bergabung meskipun pada dasarnya hubungan India dan China sebagai motor dari organisasi ini bisa dikatakan cukup buruk.

3.1 Apa itu SCO

3.1.1 Sejarah dan Perkembangan SCO

Setelah runtuhnya Soviet pada tahun 1989, Negara-Negara Asia Tengah yang baru merdeka memiliki kebutuhan dan prioritas mendesak untuk menyelesaikan sengketa wilayah dalam jangka panjang. Upaya mereka tentu saja melibatkan negosiasi batas dengan China dan juga dengan satu sama lain. Pada tahun 1991, Cina memprakarsai "Forum Shanghai" untuk memfasilitasi penyelesaian berbatasan dengan tiga negara Asia Tengah (Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan) serta Rusia sebagai negara yang sebelumnya mempunyai pengaruh jangka panjang di wilayah tersebut. Dari forum kerja sama terbatas ini, tumbuh dialog mekanisme "Shanghai Five", yang juga memperkenalkan agenda keamanan dan hubungan ekonomi yang lebih luas. Pada tahun 1996, lima negara anggotanya menandatangani "*Agreement on Confidence-Building in the Military Field in the Border Area*" di Shanghai yang diikuti satu tahun kemudian oleh "*Agreement on Mutual Reduction of Armed Forces in the Border Area*" yaitu perjanjian bersama untuk pengurangan militer di wilayah perbatasan. Perjanjian itu ditandatangani dengan suara bulat di Moskow. Setelah sebagian besar masalah keamanan perbatasan diselesaikan, dan dialog dan langkah-langkah membangun kepercayaan didirikan, "Shanghai Five" mulai melihat ke masalah mendesak lainnya yang akan membutuhkan resolusi kolektif di antara negara anggotanya.

Pada tahun 1998, "Shanghai Five" bertemu di Almaty, Kazakhstan, untuk membahas pertumbuhan ancaman separatisme etnis, ekstremisme agama, dan terorisme yang terjadi di daerah perbatasan. Pada tahun 1999, kecemasan semakin muncul dengan meningkatnya gangguan domestik dan ketidakamanan yang disebabkan oleh tiga ancaman tersebut. Lima negara anggota kemudian mendukung pendirian pusat anti-terorisme, dan mulai membuka dan memperkuat garis komunikasi antara perdana menteri dan pejabat pemerintah lainnya yang bertanggung jawab terhadap kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan publik, keamanan perbatasan, dan penegakan hukum.

Pada tahun 2001, Uzbekistan bergabung sebagai anggota baru "Shanghai Five". Lalu tepatnya pada 15 Juni 2001, Keenam kepala negara menandatangani deklarasi yang secara resmi mendirikan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) sebagai evolusi dari "Shanghai Five". Sebagai dasar untuk kerja sama dan konsensus, SCO menetapkan beberapa tujuan kolektif yaitu:

1. *Good neighborly relations between all member states;*
2. *Promotion of cooperation in politics, economics and trade, science and technology, culture, education, energy, transportation, ecology, and other fields;*
3. *Safeguarding and preserving regional peace, security and stability; and,*
4. *Striving toward a new political and economic international order that is just, and rational* (McClellan, 2013).

Tujuan utama SCO adalah memperkuat rasa saling percaya dan hubungan baik-tetangga di antara negara-negara anggota; mempromosikan kerja sama yang efektif dalam bidang politik, perdagangan dan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya serta pendidikan, energi, transportasi, pariwisata, perlindungan lingkungan dan bidang lainnya; melakukan upaya bersama untuk memelihara dan memastikan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan ini, bergerak menuju pembentukan tatanan politik dan ekonomi internasional yang baru, demokratis, adil dan rasional. Berasal dari *Spirit of Shanghai*, SCO mengejar kebijakan internal

berdasarkan prinsip-prinsip saling percaya, saling menguntungkan, persamaan hak, konsultasi, penghormatan terhadap keragaman budaya dan aspirasi menuju pembangunan bersama, kebijakan eksternalnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kesejajaran, tidak menargetkan siapapun, dan keterbukaan (SCO, 2015).

Selain itu, SCO juga menghasilkan serangkaian perjanjian kebijakan seperti komunikasi tentang kontrol senjata untuk mendukung Perjanjian ABM 1972, menentang program pertahanan rudal A.S. serta mendeklarasikan Asia Tengah sebagai Zona Perdagangan Bebas untuk Nuklir. Semua anggota berjanji untuk mendukung Piagam PBB dan juga tidak ikut campur urusan internal lainnya. Lebih jauh, para anggota menegaskan keinginan mereka untuk memperluas wilayah kerjasama untuk berdialog dengan Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Hasil akhir dari perumusan SCO pertama ini adalah Konvensi Melawan Terorisme, Separatisme, dan Ekstremisme, yang dikenal sebagai "tiga kejahatan" paling dipertimbangkan mengancam semua anggota SCO. Dengan demikian, dokumen ini menetapkan kerangka kerja dan nada untuk semua kegiatan SCO di masa depan (McClellan, 2013).

Setelah serangan teroris 11 September 2001 di Amerika, SCO mulai berkembang lebih pesat dengan cepat. Pendirian pangkalan militer AS di Uzbekistan dan Kirgistan meningkatkan kekhawatiran di Beijing dan Moskow. Akibatnya, antara Juni 2002 dan November 2004, SCO mengembangkan kerangka kerja serta struktur organisasi yang lebih formal yang merupakan staf fungsional pertama termasuk Sekretariat di Beijing dan Struktur Anti-Teroris Regional (RATS), pusat anti-terorisme regional yang berlokasi di Tashkent (McClellan, 2013). Piagam SCO ditandatangani pada KTT St.Petersburg oleh kepala Negara anggota SCO pada bulan Juni 2002 dan mulai berlaku pada 19 September 2003 (SCO, 2015). Ini adalah dokumen konstituen fundamental yang menetapkan tujuan dan prinsip-prinsip Organisasi, struktur dan bidang kegiatan utamanya. Langkah signifikan berikutnya dalam evolusi SCO, RATS menetapkan kerangka kerja untuk respon regional SCO terhadap "tiga kejahatan", serta mekanisme untuk suatu respon militer gabungan. Tak

lama setelah KTT pada bulan Mei 2003, para pemimpin SCO menyusun lebih lanjut pelembagaan SCO dengan menetapkan anggaran, kepegawaian, proses administrasi dan memperkuat perjanjian kerja sama multilateral dalam bidang ekonomi dan perdagangan . Pada bulan September 2003, para kepala negara anggota SCO menandatangani Program 20 tahun Perdagangan Multilateral dan Kerjasama Ekonomi. Sebagai tujuan jangka panjang, program ini menyediakan untuk pembentukan zona perdagangan bebas di dalam wilayah di bawah negara-negara anggota SCO; dalam jangka pendek, SCO berusaha untuk menghidupkan kembali lingkungan yang menguntungkan untuk perdagangan dan investasi. (SCO, 2015) Dengan ini dan mekanisme institusional lainnya, SCO mulai berkoordinasi dengan wilayah Asia-Pasifik.

Pada Juni 2004, SCO menerima Mongolia sebagai Negara "pengamat", dan mulai mendekat terhadap Afghanistan. Selain masalah keamanan dan stabilitas wilayah itu, mengenai ekstrimisme Islam, Rusia memprakarsai kelompok kontak SCO-Afghanistan untuk menghidupkan kembali ekonomi di Afghanistan. Semua anggota SCO menandatangani perjanjian kerja sama untuk melawan perdagangan obat-obatan terlarang. Presiden Rusia, Putin menekankan pentingnya partisipasi SCO dalam anti perdagangan narkoba dan merekomendasikan "sabuk perlindungan anti-narkoba" di sekitar Afghanistan. Para pemimpin SCO juga membentuk dana pembangunan daerah, dan menyetujui rencana untuk mengadakan forum ekonomi regional (McClellan, 2013).

Pada 2005, SCO mengalami beberapa hambatan dalam pengembangannya akibat peristiwa domestik di Kirgistan dan Uzbekistan yang di luar kendali, menyebabkan ketakutan baru di antara negara-negara anggota SCO serta kritik dunia terhadap kedua negara ini. Di bulan Maret 2005, geng jalanan Kirgistan menjatuhkan Presiden Akayev yang telah berkuasa sejak lama. Pada tahun yang sama, tepatnya dua bulan setelah insiden di Kirgistan terjadi pemberontakan yang sama di Uzbekistan. Namun polisi dan unit militer Uzbek menggunakan kekuatan mematikan untuk menghentikan pemberontakan yang terjadi di Andijon tersebut. Peristiwa ini

membuat marah opini publik di Barat, bahkan ketika para pemimpin SCO menawarkan kata-kata dukungan untuk Presiden Uzbekistan Islam Karimov (McClellan, 2013).

Terlepas dari kekacauan ini, keanggotaan SCO terus tumbuh dengan adanya India, Iran, dan Pakistan semuanya diberikan status "pengamat" pada tahun 2006 sehingga memperluas area yang dipengaruhi SCO. Pada tahun yang sama, anggota SCO berkumpul di Shanghai untuk Peringatan 5 Tahun terbentuknya SCO. Presiden Hu Jintao memuji pencapaian organisasi termasuk, kerangka hukum masalah keamanan dan kerja sama ekonomi, pertukaran dalam masalah budaya / hak asasi manusia dan kerjasamanya dengan organisasi internasional dan organisasi regional lainnya. Selain itu, negara anggota SCO membentuk Dewan Bisnis SCO, Konsorsium Antar Bank, dan Dana Pengembangan khusus untuk menanggapi meningkatnya kerja sama ekonomi. Akhirnya, semua anggota SCO meratifikasi kesepakatan bersama yang menekankan kedaulatan negara-negara anggota dalam menanggapi tahun Insiden Uzbek dan Kyrgyzstan tahun 2005 (McClellan, 2013).

Pada KTT Bishkek tahun 2007, agenda SCO mengambil nada yang lebih internasional ketika anggotanya menegaskan kembali tanggapan mereka terhadap Program Pertahanan Rudal AS, serta menyerukan perjanjian internasional untuk melarang senjata di luar angkasa. Rusia dan China juga mendukung Zona bebas senjata nuklir Asia Tengah (CANWFZ). Lalu pada bulan Agustus 2007, semua anggota SCO berpartisipasi dalam *Partnership for Peace* yang juga didukung oleh NATO (McClellan, 2013).

Selanjutnya pada KTT tahun 2008 yang diadakan di Dushanbe, Tajikistan, anggota SCO memulai dialog tentang ekspansi SCO, dan dalam konteks ini, pengembangan peraturan "mitra dialog". Anggota SCO mengubah kerangka kerja asli SCO untuk memasukkan "peraturan tentang Status mitra dialog dari SCO" yang merinci tentang proses administrasi dan aturan serta norma untuk negara yang mencari status "dialog" dari SCO (McClellan, 2013).

Pada tanggal 15 Juni 2009, KTT SCO yang kesembilan diselenggarakan di Yekaterinburg, Rusia. Dalam pertemuan ini, Afganistan dan kebangkitan kembali Taliban menjadi topik diskusi utama SCO. Namun, keamanan ekonomi domestik tetap menjadi penting ditandai dengan diratifikasinya “Inisiatif Bersama SCO untuk Meningkatkan Kerjasama Ekonomi Multilateral dalam Menangani Konsekuensi Krisis Keuangan Global” oleh semua anggotanya. Demikian pula, anggota SCO membahas konvensi untuk melindungi investasi modal mereka, serta menerapkan sistem akuntansi yang tidak akan menggunakan mata uang supranasional, melainkan sistem kredit untuk pembayaran perdagangan antar anggota SCO. Pada akhirnya SCO menyambut anggota dialog baru, yaitu Sri Lanka dan Belarus dan semua anggota berpartisipasi dalam Peace Mission 2009 (McClellan, 2013).

Pada tanggal 10 sampai 11 Juni 2010, anggota SCO mengadakan KTT tahunan mereka di Tashkent, Uzbekistan. Mengingat beberapa krisis di wilayah ini, agenda SCO fokus pada perdagangan narkoba di Afghanistan dan memulihkan ketertiban di negara bagian Kyrgyzstan yang mengalami kesulitan menyusul penggulingan rezim Presiden Bakiyev pada bulan April sebagai hasil dari perjuangan etnis sekuler. Didukung oleh keinginannya untuk menggagalkan tiga kejahatan yaitu terorisme, separatisme, dan ekstrimisme, anggota SCO menyatakan kebutuhan untuk mengembangkan mekanisme yang lebih baik menanggapi krisis regional. Selain itu, agenda KTT ini termasuk tentang prosedur mengadopsi anggota tetap baru. Pada pertemuan khusus ini, aplikasi Iran untuk keanggotaan permanen diveto oleh Rusia dan anggota lainnya sesuai dengan aturan SCO yaitu negara yang mengalami kesulitan dengan status hukum mereka tidak dapat menjadi anggota SCO. Namun, Iran, yang telah di bawah sanksi resmi PBB untuk beberapa waktu, mempertahankan statusnya sebagai "pengamat" (McClellan, 2013).

Pada tahun 2011, anggota SCO bertemu di Astana, Kazakhstan, untuk merayakan hari jadi SCO yang ke 10. Sementara agenda umum dalam pertemuan ini adalah kegiatan perayaan, dalam kesempatan yang sama Dewan Kepala SCO menyetujui “Strategi Anti-Narkoba” SCO dan rencana aksi terkait untuk tahun 2011

sampai 2016, serta "Memorandum Kewajiban" untuk negara-negara yang mencari penuh status negara anggota dalam SCO. Selanjutnya, SCO dan Kantor PBB terkait Narkoba dan Kejahatan menandatangani Nota Kesepakatan mengenai rencana SCO untuk kontra-narkotika (McClellan, 2013).

Pada tahun 2012 SCO mengadakan pertemuan yang benar-benar penting. Pada pertemuan tahunan tanggal 6 sampai 7 Juni 2012 dihadiri para kepala negara-negara anggota SCO dan mengakui Afghanistan sebagai negara pengamat formal dan menunjuk Turki sebagai mitra dialog. Adanya penarikan militer NATO yang akan datang dari wilayah tersebut akhirnya mendorong SCO untuk mengambil peran yang lebih besar dalam mengamankan keamanan Afghanistan. Meskipun demikian, SCO masih memiliki sejumlah masalah penting untuk diatasi sebelum dapat menjadi organisasi regional yang benar-benar efektif (McClellan, 2013).

Pada tahun-tahun sebelumnya, para peserta KTT SCO menanggukkan permohonan Afghanistan untuk menjadi pengamat SCO formal. SCO mengakui perlunya meningkatkan keterlibatan mereka dengan negara itu mengingat penarikan militer NATO yang akan datang dari Afghanistan. Faktanya, SCO tampak tidak yakin mengenai jenis struktur keamanan apa yang ingin mereka bangun setelah NATO mengurangi kehadiran militernya di Asia Tengah. Ketidakpastian ini bahkan meluas ambiguitas mengenai kapan mereka ingin pasukan tempur NATO untuk mundur. di berbagai kesempatan mereka mendesak NATO untuk meninggalkan daerah Asia Tengah secepat mungkin tetapi di waktu yang lain juga ingin mereka tetap tinggal selama diperlukan. Mempererat hubungan dengan Afghanistan dengan menjadikannya pengamat SCO resmi - bersama dengan Iran, India, Pakistan, dan Mongolia - dapat membantu mengimbangi penarikan militer NATO, tetapi pemerintah Cina enggan merangkul pemerintah Afghanistan karena takut memusuhi Taliban, yang bisa membahayakan kepentingan ekonomi China yang tumbuh di Afghanistan. Sejauh ini, kegiatan SCO mengenai Afghanistan pada dasarnya terbatas pada mengeluarkan deklarasi bersama dan berbagi informasi tentang perdagangan narkotika melalui Pusat Informasi dan Koordinasi Regional Asia Tengah dan

mekanisme lainnya. Tidak seperti Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif / *Collective Security Treaty Organization* (CSTO) yang dipimpin Rusia, anggota SCO belum terlibat dalam operasi counter narcotics secara kolektif. Tidak seperti NATO dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, SCO belum memberikan pelatihan bersama untuk para counternarcotics Afghanistan dan petugas penegak hukum lainnya. (Weitz, 2012)

Pada tanggal 13 September 2013, pertemuan SCO berlangsung di Bishkek, ibukota Kirgistan. Para pemimpin Rusia, Cina, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Afghanistan, Iran, dan Mongolia, serta delegasi dari India dan Pakistan, yang keduanya berstatus pengamat di SCO, menghadiri KTT dan menguraikan posisi mereka pada sejumlah masalah geopolitik. Posisi bersama para peserta tercermin dalam apa yang disebut "Deklarasi Bishkek" (McClellan, 2013).

Situasi keamanan di Afghanistan setelah penarikan pasukan NATO pada akhir tahun 2014 adalah salah satu topik utama yang menjadi perhatian internasional yang dibahas pada KTT SCO ke-13 di Bishkek (Sabyrbekov, 2013). Presiden Kyrgyzstan Almazbek Atambayev, menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas situasi di Afghanistan setelah 2014. Presiden Kirgistan menyatakan bahwa kegiatan kelompok teroris dan ekstremis masih meningkat di Afghanistan dan memanggil pada negara-negara anggota SCO untuk terus mendukung Kabul dalam upaya dan tekadnya untuk menghidupkan kembali Negara tersebut. Konferensi tersebut dihadiri oleh para ahli terkemuka dan akan menjadi kesempatan lain untuk bersama-sama mencari solusi, bertukar ide dan keprihatinan. Dalam KTT Bishkek juga menyorot partisipasi Presiden Iran yang baru terpilih, Hassan Rouhani, karena ini merupakan perjalanan luar negeri pertamanya sejak menjabat pada 4 Agustus 2013 (Sabyrbekov, 2013). Presiden Iran menggunakan KTT SCO untuk mengadakan sejumlah pembicaraan bilateral dengan para pemimpin lainnya, di antaranya yaitu Presiden Rusia Vladimir Putin, yang menyatakan bahwa Iran, seperti halnya anggota masyarakat internasional lainnya, memiliki hak untuk mengembangkan dan menggunakan tenaga nuklir untuk tujuan damai. Pada gilirannya, Presiden Rouhani

mendukung posisi Moskow mengenai situasi di Suriah, dengan mengatakan bahwa keterlibatan militer eksternal hanya dimungkinkan dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB dan hanya setelah habisnya semua alat diplomatik. Para pemimpin Cina, Kazakh, Kirgistan, Uzbek dan Tajik juga menyatakan dukungan mereka untuk posisi Rusia dan bersama-sama menyambut keputusan Damaskus untuk bergabung dengan larangan global terhadap senjata kimia. Ilmuwan Politik Kyrgyzstan Sheradil Baktygulov percaya bahwa perumusan posisi bersama ini dalam masalah-masalah internasional dan regional merupakan langkah maju yang penting untuk mengubah SCO menjadi platform dan kekuatan yang bersatu secara regional.

Partisipasi Presiden Cina Xi Jinping di KTT Bishkek juga mendapat sorotan tajam dari masyarakat internasional. Sebelum dimulainya KTT, pemimpin Cina melakukan kunjungan resmi ke hampir semua ibu kota Asia Tengah dan berhasil mencapai kesepakatan energi bernilai miliaran dolar. Selama kunjungannya ke Ashgabat, kedua belah pihak mencapai kesepakatan atas potensi tiga kali lipat impor gas ke China pada tahun 2020 (Sabyrbekov, 2013). Selanjutnya, Beijing menandatangani kesepakatan dengan Tashkent senilai US \$ 15 miliar dan menyatakan kesiapannya untuk menginvestasikan 3 miliar lainnya ke negara tetangga Kyrgyzstan yang secara strategis dianggap penting. Pakar kebijakan luar negeri percaya bahwa perjanjian ini menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tengah bekas Uni Soviet tidak lagi terkunci dalam pelukan Moskow ketika menyangkut investasi ekonomi. Pada KTT Bishkek SCO, Cina menegaskan kembali dukungannya untuk posisi Moskow pada situasi di Suriah dan juga menyarankan untuk meluncurkan akun SCO khusus untuk memberikan dukungan keuangan bagi anggota yang sangat membutuhkan.

KTT Bishkek ditutup dengan adopsi deklarasi masing-masing, yang menekankan perlunya mengambil tindakan bersama dalam perang melawan terorisme, ekstremisme, separatisme, perdagangan narkoba ilegal dan ancaman transnasional lainnya. Deklarasi Bishkek juga mencakup posisi bersama negara-negara anggota tentang situasi di Suriah, yaitu penghormatan terhadap kedaulatan

negara dan kebutuhan untuk menempatkan senjata kimia Suriah di bawah kendali internasional. Deklarasi ini juga berfokus pada modernisasi lebih lanjut dari ekonomi nasional, pembentukan kemitraan investasi yang lebih dekat, kerjasama di bidang teknologi inovatif dan sektor pertanian, pengembangan transportasi dan komunikasi, dan kebutuhan untuk melakukan pekerjaan lebih lanjut dalam meluncurkan Bank Pengembangan SCO khusus. Sesuai dengan Piagam lembaga tersebut, kepemimpinan untuk periode mendatang diserahkan ke Tajikistan, yang akan menjadi tuan rumah KTT tahun depan di ibukotanya Dushanbe (Sabyrbekov, 2013).

Selanjutnya SCO menyelenggarakan KTT selama dua hari di ibukota Tajikistan, Dushanbe, pada tanggal 11 September 2014. Agenda tahun ini memiliki fokus besar pada keamanan regional menjelang rencana penarikan pasukan NATO di Afghanistan pada akhir tahun tersebut. Topik utama lain dalam agenda tahun ini adalah menyelesaikan suatu mekanisme untuk menerima anggota baru dalam organisasi. (RFE/RL, 2014) Selama kepresidenan Tajikistan sekitar sepuluh pertemuan Dewan Koordinator Nasional SCO diadakan di Dushanbe. Perlu dicatat, khususnya, bahwa dalam periode 13 tahun keberadaan SCO, hanya di bawah kepemimpinan Tajikistan SCO negara-negara anggotanya melakukan inventarisasi kerangka hukum kerja sama dalam SCO untuk pertama kalinya. Dalam rangka inventaris ini, para pihak telah melakukan analisis hukum terhadap implementasi keputusan Dewan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri) dan Dewan Menteri Luar Negeri, untuk tujuan mereka selanjutnya dengan eksekusi yang tepat. Verifikasi data tentang implementasi prosedur internal pada perjanjian internasional yang ditandatangani dalam kerangka kerja SCO juga dilakukan selama proses inventarisasi ini. (diplomatmagazine, 2014)

KTT Organisasi Kerjasama Shanghai ke-15 diselenggarakan di Ufa, Rusia pada tanggal 9 sampai 10 Juli 2015. KTT ini dianggap unik dalam banyak hal. Pertama, untuk pertama kalinya dalam 15 tahun SCO, memutuskan untuk menambah jumlah anggotanya. KTT tersebut menandai dimulainya proses resmi untuk dimasukkannya Pakistan dan India dalam SCO sebagai anggota penuh. Kedua, KTT

SCO diadakan bersama dengan KTT BRICS di bawah satu atap di mana para pemimpin dari 15 negara berkumpul dari berbagai benua. Ketiga, selain perluasan SCO, beberapa keputusan penting lainnya diambil pada pertemuan puncak. Beberapa keputusan penting termasuk: pengesahan *SCO Development Strategy 2025*, persetujuan program kerja sama tiga tahun (2016-2018) untuk memerangi terorisme, separatisme dan ekstremisme, meningkatkan status Belarus dari mitra dialog menjadi status pengamat dan mengambil di Azerbaijan, Armenia, Kamboja, dan Nepal sebagai mitra dialog baru. (MUNIR, 2015)

Pada tahun 2016, Negara anggota, pengamat, dan tamu dari Shanghai Cooperation Organization (SCO) berkumpul di Tashkent, Uzbekistan, untuk pertemuan puncak tahunan mereka. Dalam pertemuan ini masih diisi dengan topik-topik politik, ekonomi dan keamanan namun masih belum nampak focus dalam pembahasan sebenarnya. KTT dua hari ini menyentuh pada isu-isu hijau yang mengganggu wilayah, terutama masalah keamanan yang berasal dari Afghanistan dan terorisme internasional. Dalam KTT ini untuk pertama kalinya India dan Pakistan bergabung dengan enam anggota penuh lainnya, yang menjadi ekspansi pertama sejak Uzbekistan bergabung dengan apa yang dulu dikenal sebagai Shanghai Five pada tahun 2001. (Putz, 2016) Pada tanggal 24 Juni 2016 India dan Pakistan menandatangani Nota Kesepakatan SCO, penandatanganan oleh India dan Pakistan ini sebagai langkah untuk memulai proses formal dalam bergabung dengan SCO sebagai anggota penuh.

Dalam KTT SCO tahun 2017 yang diselenggarakan tanggal 8 sampai 9 Juni di Astana, ibu kota Kazakhstan akhirnya India dan Pakistan mendapatkan pengakuan secara penuh menjadi anggota tetap SCO setelah sebelumnya menjadi negara pengamat dan melalui proses selama dua tahun sejak tahun 2015. Sejak itu delapan anggota SCO termasuk India dan Pakistan menyumbang sekitar setengah dari populasi dunia, seperempat dari PDB dunia, dan sekitar 80 persen dari daratan Eurasia. Dua dari anggota SCO adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Rusia dan China), dan empat dari anggotanya adalah negara nuklir (Rusia, Cina, India, dan

Pakistan). Tiga dari anggota SCO adalah bagian dari pengelompokan BRICS (Rusia, Cina, dan India). (Usmanov, 2018)

3.1.2 Keanggotaan SCO

Semenjak Uzbekistan bergabung dengan Shanghai Five pada tahun 2001 dan berganti nama menjadi SCO (*Shanghai Cooperation Organization*) organisasi ini terus mengalami perkembangan dan menarik minat negara di kawasan Asia untuk bergabung. Tidak hanya itu SCO juga membuka diri dengan menerima mitra dialog dari Negara yang ingin bekerja sama dengan organisasi ini. Hal ini tidak terlepas dari potensi besar yang ditawarkan oleh SCO sebagai organisasi keamanan regional. Rusia dan China merupakan negara anggota SCO yang memiliki peranan paling penting dalam organisasi SCO. China merupakan kekuatan baru dalam bidang perekonomian, sedangkan Rusia merupakan negara dengan salah satu sistem militernya yang kuat. Dengan hadirnya Rusia dan China sebagai penggerak organisasi SCO, membuat beberapa Negara sekitar kawasan Asia Selatan mulai menginginkan menjadi anggota SCO, termasuk India yang sudah resmi menjadi anggota baru dalam organisasi ini (Sinaga, 2017).



Gambar 3.1 Peta Keanggotaan SCO

Sumber : Council on Foreign Relations

Dari gambar 3.1 dapat diketahui saat ini, delapan negara menikmati status sebagai anggota penuh SCO yaitu India, Kazakhstan, Cina, Kyrgyzstan, Rusia, Pakistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Empat negara yaitu Afghanistan, Belarus, Iran dan Mongolia memiliki status pengamat dalam SCO, dan enam negara yaitu Azerbaijan, Armenia, Kamboja, Nepal, Turki dan Sri Lanka memiliki status mitra dialog SCO.

3.1.3 Sistem kerja SCO

Dalam internal SCO organisasi ini memiliki sistem kerja yang terdiri dari Kepala Dewan Negara (HSC / *Heads of State Council*) adalah badan pembuat keputusan tertinggi di SCO. Mereka bertemu setiap tahun sekali untuk mengambil keputusan dan memberikan instruksi tentang semua masalah penting terkait aktivitas

SCO. Selanjutnya ada Kepala Dewan Pemerintah (HGC / *Heads of Government Council*) yang bertemu sekali setahun untuk membahas strategi kerja sama multilateral dan arah prioritas dalam kerangka kerja Organisasi, untuk menyelesaikan masalah-masalah kerja sama yang penting dan mendesak di bidang ekonomi dan bidang lainnya, serta untuk mengadopsi anggaran tahunan Organisasi. Selain HSC dan HGC, ada juga mekanisme pertemuan di tingkat Pembicara Parlemen, Sekretaris Dewan Keamanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Bantuan Darurat, Ekonomi, Transportasi, Budaya, Pendidikan, Kesehatan, Kepala Instansi Penegakan Hukum, Mahkamah Agung dan Pengadilan Arbitrase, dan Jaksa Agung. Dewan Koordinator Nasional Negara-negara Anggota SCO (*Council of National Coordinators / CNC*) bertanggung jawab untuk mengoordinasikan interaksi dalam kerangka SCO.

Organisasi ini memiliki dua badan permanen yaitu Sekretariat yang berada di Beijing (China) dan Struktur Anti-Teroris Regional (RATS/Regional Anti-Terrorist Structure) yang berada di Tashkent ibukota Uzbekistan. RATS beroperasi sesuai dengan Piagam SCO yaitu Konvensi Shanghai tentang Pemberantasan Terorisme, Separatisme dan Ekstremisme. Perjanjian di antara negara-negara anggota SCO tentang Struktur Anti-Teroris Regional, serta dokumen dan keputusannya juga diadopsi dalam kerangka kerja SCO. Sekretaris Jenderal SCO dan Direktur Komite Eksekutif RATS ditunjuk oleh HSC untuk periode tiga tahun. Sejak 1 Januari 2016, pos-pos ini masing-masing dipegang oleh Rashid Alimov (Tajikistan) dan Evgeniy Sisoev (Rusia). Bahasa Rusia dan China adalah bahasa kerja resmi SCO. (SCO, 2015)

3.1.4 Hubungan Eksternal SCO

Organisasi Kerjasama Shanghai berfokus pada kerja sama dengan organisasi internasional dan regional. Kerangka hukum hubungan luar negeri SCO saat ini terdiri dari dokumen-dokumen berikut (dalam urutan kronologis):

- a. Nota Kesepahaman antara SCO dan *the Executive Committee of the Commonwealth of Independent States* (CIS)

Nota Kesepahaman antara Sekretariat SCO dan *the Executive Committee of the Commonwealth of Independent States* (CIS) ditandatangani pada 12 April 2005. Dokumen tersebut mengidentifikasi bidang-bidang prioritas kerja sama, seperti keamanan (memastikan keamanan regional dan internasional, melawan terorisme, ekstremisme, separatisme, perdagangan narkoba dan senjata, kejahatan terorganisir dan transnasional), ekonomi (perdagangan, syarat dan ketentuan untuk mempromosikan barang, jasa, dan membiayai, mempromosikan dan melindungi investasi, transportasi dan komunikasi, perlindungan lingkungan, teknologi informasi, dan pariwisata) dan bidang kemanusiaan (budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kesehatan). Kontak teratur dipertahankan di tingkat kepala badan eksekutif. Konsultasi diadakan di tingkat ahli Sekretariat SCO dan Komite Eksekutif CIS tentang berbagai aspek kerjasama ekonomi, budaya, kemanusiaan dan informasi dalam SCO dan CIS, serta dalam memerangi ancaman dan tantangan modern.

- b. Nota Kesepahaman antara SCO dan *the Secretariat of the Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN)

Nota Kesepahaman antara sekretariat SCO dan ASEAN ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 April 2005. Dokumen tersebut mengidentifikasi bidang-bidang prioritas kerja sama seperti memerangi terorisme, perdagangan narkoba dan senjata, pencucian uang, dan migrasi ilegal. Wilayah kerja sama lain yang mungkin diuraikan, seperti ekonomi dan keuangan, energi, termasuk tenaga air dan biofuel, pariwisata, lingkungan dan sumber daya alam, dan pembangunan sosial.

- c. Nota Kesepahaman antara SCO dan *Collective Security Treaty Organisation* (CSTO)

Nota Kesepahaman antara sekretariat SCO dan CSTO ditandatangani di Dushanbe pada tanggal 5 Oktober 2007. Dokumen tersebut menguraikan pokok-pokok kesepakatan mengenai pembentukan dan pengembangan hubungan kerja sama yang setara dan konstruktif antara sekretariat SCO dan CSTO dalam memastikan keamanan dan stabilitas regional dan internasional; melawan terorisme; memerangi perdagangan narkoba; mengganggu perdagangan senjata; memerangi kejahatan transnasional terorganisir; dan bidang lain yang menjadi kepentingan bersama.

d. Nota Kesepahaman antara Sekretariat SCO dan *Economic Cooperation Organisation* (ECO)

Nota Kesepahaman antara SCO dan ECO ditandatangani di Ashgabat pada 11 Desember 2007. Dokumen tersebut mencatat bahwa para pihak akan bekerja sama dengan berbagi informasi dan pengalaman positif dalam bidang ekonomi dan perdagangan, transportasi, energi, lingkungan, pariwisata, dan bidang lain yang menjadi kepentingan bersama.

e. Deklarasi Bersama tentang Kerjasama antara Sekretariat Organisasi SCO dan Organisasi PBB

Pada tanggal 5 April 2010, Sekretaris Jenderal SCO dan Sekretaris Jenderal PBB menandatangani Deklarasi Bersama tentang Kerjasama antara Sekretariat SCO dan PBB, di Tashkent. Deklarasi tersebut, antara lain, menyatakan niat para pihak untuk memperluas kerjasama dalam komunikasi dan pertukaran informasi.

f. Nota Kesepahaman antara SCO dan the UN *Office on Drugs and Crime* (UNODC)

SCO telah menjalin hubungan dekat dengan divisi-divisi PBB, termasuk Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dan Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik. Pada bulan Juni 2011 di Astana, Sekretaris Jenderal

SCO dan Direktur Eksekutif UNODC menandatangani Nota Kesepahaman antara Sekretariat SCO dan UNODC.

g. Nota Kesepahaman antara SCO dan UN *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* pada tanggal 21 Agustus 2012

Kerjasama ekonomi yang dibentuk oleh SCO ini merupakan kerjasama dalam tingkatan ekonomi makro sebagai bentuk kolaborasi ekonomi dalam bidang perdagangan, infrastruktur dan transportasi.

h. Nota Kesepahaman antara SCO dan Sekretariat *Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia* (CICA)

Nota Kesepahaman antara Sekretariat SCO dan Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA) ditandatangani di Shanghai pada 20 Mei 2014. SCO dan CICA mengambil pendekatan yang mirip dengan masalah mendasar saat ini, seperti menyelesaikan konflik regional, memperkuat rezim non-proliferasi inti, dan mencari tanggapan bersama terhadap tantangan saat ini, seperti terorisme, separatisme, ekstremisme, perdagangan narkoba, kejahatan transnasional, dan perdagangan senjata.

i. Nota Kesepahaman antara SCO dan *International Committee of the Red Cross* (ICRC)

Pada 9 Juni 2017, Sekretariat Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) menandatangani nota kesepahaman di sela-sela Pertemuan Kepala Dewan Negara SCO di Astana. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal SCO Rashid Alimov dan Wakil Presiden ICRC Christine Beerli. Memorandum tersebut menyatakan bahwa para pihak akan mempertahankan dialog tentang isu-isu yang terkait dengan International humaniter law (IHL) yang hanya berlaku untuk konflik bersenjata; membantu menerapkan norma IHL dan dokumen hukum internasional lainnya; mengedarkan informasi

hukum tentang IHL dan implementasinya; mengembangkan dialog di bidang kemanusiaan; dan mengatur acara untuk mencegah dan menanggapi keadaan darurat. Para pihak juga akan bekerja sama dalam penegakan hukum, pendidikan dan perawatan kesehatan dengan secara teratur bertukar informasi, dokumen hukum, dan rekomendasi tentang masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. Mereka juga akan bekerja sama menyusun dan melaksanakan proyek dan program bersama. (SCO, 2017)



BAB 5. KESIMPULAN

Keputusan India bergabung dengan SCO pada tahun 2006 sebagai Negara pengamat hingga resmi menjadi Negara anggota SCO pada tahun 2017 merupakan keputusan yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Hal ini dikarenakan hubungan diplomatik India dengan China sebagai motor utama dalam organisasi keamanan regional ini tidaklah cukup baik. Pada sejarah awal berdirinya kedua negara ini, keduanya merupakan kerabat dekat karena latar belakang sejarah dan kesamaan ideologi. Dalam perkembangannya kedua negara ini mulai mengalami ketegangan hingga timbul konflik yang disebabkan masalah perbatasan, persaingan pengaruh di wilayah asia timur serta hubungan diplomatik dengan negara lain. Bahkan kedua negara ini juga menghadapi potensi konflik lain dari permasalahan sumber air di Tibet. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa India memutuskan bergabung dengan SCO ditengah buruknya hubungan diplomatik dengan China sebagai motor organisasi tersebut

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa India bergabung dengan SCO untuk menambah jalur komunikasi dengan China dan negara negara anggota lainnya agar tercipta *Confidence building (Political CBM)* yaitu membangun kepercayaan di antara negara anggota SCO dengan tujuan mencapai solusi politis seperti megurangi tensi konflik dan mendorong adanya kerjasama yang lebih luas dengan China dan anggota SCO lainnya. SCO berperan sebagai jalur komunikasi bagi India yang menghubungkan India dengan China dan anggota SCO lainnya melalui mekanisme yang terdapat dalam struktur organisasi SCO. Dengan bergabung dalam SCO India akan mempunyai pola interaksi baru dengan China dan anggota SCO lainnya.

Berdasarkan teori Neo Liberalis Institusionalis, India sebagai negara yang mempunyai konflik dengan China, bergabung dalam SCO merupakan langkah untuk mendapatkan keuntungan. Di bidang ekonomi dengan bergabung dalam SCO, India

dapat menyambung kembali dan memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan negara-negara Asia Tengah. Hal ini guna memenuhi kebutuhan energi India yang cukup besar serta meningkatkan kerjasama ekonomi lain yang mana negara-negara di Asia Tengah dapat menjadi pasar perdagangan bagi India.

Dalam bidang keamanan India dapat meningkatkan perannya di lingkungan regional serta mengawasi pengaruh yang terus tumbuh dari China di Eurasia dan mengurangi ketegangan di antara keduanya. Keanggotaan penuh India di SCO akan mendapat keuntungan dari *Regional Anti-Terrorist Structure* (RATS) dengan meningkatkan pengalaman kontra terorismenya, berbagi informasi intelijen, mekanisme penegakan hukum, mengembangkan praktik dan teknologi terbaik, bantuan hukum timbal balik, pengaturan ekstradisi. Bersama dengan SCO India juga dapat memainkan peran lebih di Afghanistan. Keanggotaan SCO juga akan memungkinkan India untuk menghalangi upaya Pakistan untuk menggunakan forum SCO untuk memobilisasi dukungan untuk kegiatan anti-India. Dialog teratur dengan CAR melalui platform SCO dapat menghambat kemungkinan dukungan yang lebih besar terhadap Pakistan. Pada akhirnya sebagai anggota sebuah organisasi yang pengaruhnya terus berkembang, India akan mampu untuk mencapai posisi yang kuat di dunia dengan melihat fakta besarnya sumber daya yang dimiliki SCO.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Keohane, R. O. (1989). Neoliberal Institutionalism. In *A Perspective on World Politics, in International Institutions and State Power* (p. 1). Nevada: Westview Press.

Krepon, M. (1998). Conflict Avoidance, Confidence-Building, and Peacemaking. *A Handbook of Confidence-Building Measures for Regional Security (3rd Edition)* (pp. 1-14). Washington DC: The Henry L. Stimson Center.

Hara, A. E. (2011). *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme Sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Moleong, L. (1995). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.

Ruggie, J. G. (1993). *Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of an Institutional Form*. New York: Columbia University Press.

Jurnal:

Abitbo, A. D. (2009). Causes of the 1962 Sino-Indian War: A systems Level Approach. *Josef Korbel Journal of Advanced International* , 74-88.

Bentham, Y. v. (2018). China's Role in the ASEAN Regional Forum: A Search For Peace? *An Analysis of China's Political Behaviour in the South China Sea Dispute* , 50.

Farooq, M. (2010). Pakistani-Chinese Relations: An Historical Analysis of the Role of China in the Indo-Pakistani War of 1971. *Pakistaniaat: A Journal of Pakistan Studies Vol. 2, No. 3* , 79-80.

Johan Jorgen Holst. (1983). Confidence Building Measures : A Conceptual Framework. *Survival*, Volume. 25, No. 1, 2-4.

Simon, J. A., & Siegfried, M. (2013). Confidence Building Measures (CBMs) in Peace Processes. *Confidence Building Measures (CBMs) in Peace Processes, In: Managing Peace Processes: Process related questions. A handbook for AU practitioners, Volume 1, African Union and the Center for Humanitarian Dialogue* , 57-77.

Report:

Chari, P.R. (2003). *Nuclear Crisis : Escalation Control and Deterrence in South Asia*. Stimson Centre Working Paper.

Desjardins, Marie-France. (1996). *Rethinking Confidence Measures*. London: International Institute of Strategic Studies.

Santiko, U. (2008). *Kebijakan Luar Negeri Republik Federasi Rusia (2001-2007): Studi Kasus mengenai Kebijakan Luar Negeri Rusia dalam mendorong pembentukan Shanghai Cooperation Organization*. FISIP UI.

McClellan, C. S. (2013). *The Shanghai Cooperation Organization : Should the U.S. be Concerned?*. Philadelphia: U.S. Army War College.

Artikel:

Pak, J. H. (2016, Summer). Challenges in Asia. *China, India, and War over Wate* , pp. 56-67.

Suhag, P. S. (2017). *INDIA'S MEMBERSHIP IN SHANGHAI COOPERATION ORGANISATION: AN APPRAISAL*. The Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA).

Internet

Achom, D. 2018. Doklam Belongs To China, India Should Have "Learnt Lessons", Says Beijing. <https://www.ndtv.com/india-news/doklam-belongs-to-china-india-should-have-learnt-lessons-says-beijing-1828803>. [Diakses pada 23 Januari 2019]

- Afridi, J., & Bajoria, 2010. China-Pakistan Relations. <https://www.cfr.org/backgrounder/china-pakistan-relations> [Diakses pada 30 Januari 2019]
- BS Web Team. 2018. *SCO summit 2018 LIVE updates: New people-to-people mechanism on cards*. https://www.business-standard.com/article/current-affairs/sco-summit-2018-live-updates-narendra-modi-xi-jinping-talks-in-china-today-118060900111_1.html [Diakses pada 27 Juni 2019]
- Burkett, R. W. 2018. Major Rivers Sourced In Tibet. <http://eastern.historianseye.com: http://eastern.historianseye.com/major-rivers-sourced-in-tibet/>. [Diakses pada 24 Januari 2019]
- CHARTER OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION. (n.d.). 2018. <http://scochina.mfa.gov.cn/eng/> Balachandran, M. 2015. *A complete timeline of India-China relations since Modi took charge*. <https://qz.com/india/404869/a-complete-timeline-of-india-china-relations-since-modi-took-charge/> [Diakses pada 27 Juni 2019]
- Chaudhury, D. R. 2018. China should stop ratcheting up 1962, remember 1967 Nathu La battle . <https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/china-should-stop-ratcheting-up-1962-remember-1967-nathu-la-battle/articleshow/59552208.cms>. [Diakses pada 21 Juli 2018]
- Chossudovsky, M. 2018. *Qingdao SCO Summit: "Secret Meeting" between Vladimir Putin, Xi Jinping and Kim Jong-un?* <https://www.globalresearch.ca/qingdao-sco-summit-secret-meeting-between-vladimir-putin-xi-jinping-and-kim-jong-un/5642532> [Diakses pada Juni 27 2019]
- china-embassy.org. 2010. Embassy of the People's Republic of China in the United States of America, Foreign Ministry Spokesperson Jiang Yu's Remarks. <http://www.china-embassy.org/eng/fyrth/t706322.htm>. [Diakses pada 28 Agustus 2018]
- Council of Foreign Relations . 2019. Conflict Between India and Pakistan. <https://www.cfr.org/interactives/global-conflict-tracker#!/conflict/conflict-between-india-and-pakistan>. [Diakses pada 30 Januari 2019]

- Debora, Y. 2017. Perselisihan antara Cina dan India yang Tak Kunjung Usai. <https://tirto.id/perselisihan-antara-cina-dan-india-yang-tak-kunjung-usai-ct8E>. [Diakses pada 21 Juli 2018]
- Desai, S. 2017. India's SCO Challenge. <https://thediplomat.com/2017/12/indias-sco-challenge/>. [Diakses pada 11 April 2019]
- Desk, I. T. 2018. Where is Doklam and why it is important for India? <https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/where-doklam-why-important-india-china-bhutan-1198730-2018-03-27>. [Diakses pada 23 Januari 2019]
- diplomatmagazine. 2014. The results of the SCO summit in Dushanbe, 2014. <http://www.diplomatmagazine.nl/2014/11/03/results-sco-summit-dushanbe-2014/>. [Diakses pada 1 April 2019]
- Dutta, P. K. 2017. This day in 1962: China-India war started with synchronised attack on Ladakh, Arunachal. <https://www.indiatoday.in/india/story/india-china-war-1962-20-october-aksai-chin-nefa-arunchal-pradesh-1067703-2017-10-20>. [Diakses pada 21 Juli 2018]
- Economist, T. (n.d.). 2019. South-Asian territorial claims. <https://www.economist.com/node/21591086/mobile-frameless>. [Diakses pada 30 Januari 2019]
- Glaser, B. S. (n.d.). 2018. Confidence-Building Measures. <https://www.csis.org/programs/international-security-program/isp-archives/asia-division/cross-strait-security-initiativ-1>. [Diakses pada 25 September 2018]
- Hein, M. V. 2012. Persaingan India dan Cina. <https://www.dw.com/id/persaingan-india-dan-cina/a-16291217>. [Diakses pada 21 Juli 2018]
- IndiaToday.in. 2016. India-China War of 1962: How it started and what happened later. <https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/india-china-war-of-1962-839077-2016-11-21>. [Diakses pada 17 Januari 2019]

- infoshos.ru. 2015. SCO Energy Club: structure ready for international interaction, not Shanghai Six's elite club. <http://infoshos.ru: http://infoshos.ru/en/?idn=13913>. [Diakses pada 11 April 2019]
- Javaid, U. 2006. Compulsive Confidence Building in South Asia., https://www.researchgate.net/publication/309486661_Compulsive_Confidence_Building_in_South_Asia. [Diakses pada 26 September 2018]
- Khokhar, R. 2019. A Skeptics Guide to Managing the India-Pakistan Conflict. <https://nationalinterest.org/feature/skeptics-guide-managing-india-pakistan-conflict-48537>. [Diakses pada 10 Mei 2018]
- Kompas. 2017. India dan Pakistan Ikut Kerjasama Sanghai. <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170610/281741269396321>. [Diakses pada 26 Agustus 2018]
- Krishnan, A. 2017. The last Sikkim stand-off: When India gave China a bloody nose in 1967. <https://www.indiatoday.in/world/asia/story/india-china-stand-off-sikkim-stand-off-tulung-la-nathu-la-pass-doklam-plateau-1021579-2017-06-30>. [Diakses pada 23 Januari 2019]
- Livemint. 2017. *India and China: A timeline of how ties have unfolded over the years*. <https://www.livemint.com/Politics/X2JQZHZEDEPGNBpMjLqCl9I/India-and-China-A-timeline-of-how-ties-have-unfolded-over-t.html> [Diakses pada 27 Juni 2019]
- Madan, T. 2017. How the U.S. viewed the 1967 Sikkim skirmishes between India and China. <https://www.brookings.edu/opinions/how-the-u-s-viewed-the-1967-sikkim-skirmishes-between-india-and-china/>. [Diakses pada 23 Januari 2018]
- Maulana, V. 2015. India-Pakistan Gabung Blok Keamanan Pimpinan Rusia dan China. <https://international.sindonews.com/read/1021227/40/india-pakistan-gabung-blok-keamanan-pimpinan-rusia-dan-china-1436270939>. [Diakses pada 20 September 2018]

- Ministry of External Affairs Government of India. 2012. *Ministry of External Affairs Government of India*. <https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/asean-regional-forum-august-2012.pdf>. [Diakses pada 17 Agustus 2018]
- Ministry of External Affairs Government of India. 2016. Speech by Prime Minister at SCO Summit (June 24, 2016). https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/26948/Speech_by_Prime_Minister_at_SCO_Summit_June_24_2016. [Diakses pada 17 Januari 2019]
- Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia. 2019. ASEAN Regional Forum (ARF). https://kemlu.go.id/portal/en/read/126/halaman_list_lainnya/asean-regional-forum-arf. [Diakses pada 18 Januari 2019]
- MUNIR, D. M. 2015. OUTCOME OF SCO SUMMIT. Retrieved April 2, 2019, from www.ipripak.org: <http://www.ipripak.org/outcome-of-sco-summit/>. [Diakses pada 2 April 2019]
- Patranobis, S. 2018. India rejects China's latest offer to join BRI. <https://www.hindustantimes.com/world-news/india-rejects-china-s-latest-offer-to-join-bri/story-vH6Pc7nttZJ73PMiNGHpL.html>. [Diakses pada 26 Juli 2018]
- Press Information Bureau Government of India. (2018, November 30). *Prime Minister Visits Abroad*. <http://pib.nic.in/PMContents/PMVisitRelaese.aspx?VID=2331> [Diakses pada 27 Juni 2019]
- Press Information Bureau Government of India. 2018. *Russia-India-China Trilateral*. <http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1554380> [Diakses pada 27 Juni 2019]
- PTI. 2016. Organisation of Islamic Cooperation backs Pak, asks India to cease atrocities in Kashmir. <https://indianexpress.com/article/world/world-news/organisation-of-islamic-cooperation-backs-pak-asks-india-to-cease-atrocities-in-kashmir-3040409/>. [Diakses pada 21 Mei 2018]

- PTI. 2018. *PM Modi meets Chinese President Xi Jinping on sidelines of BRICS Summit*. <https://www.thehindu.com/news/national/pm-modi-meets-chinese-president-xi-jinping-on-sidelines-of-brics-summit/article24528356.ece> [Diakses pada 27 Juni 2019]
- PTI. 2019. *First anniversary of Modi-Xi Jinping Wuhan summit celebrated with 'colours of India' week*. <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/first-anniversary-of-modi-xi-jinping-wuhan-summit-celebrated-with-colours-of-india-week/articleshow/69100568.cms?from=mdr> [Diakses pada 27 Juni 2019]
- PTI. 2019. *President Xi to meet PM Modi on sidelines of SCO summit*. <https://www.thehindubusinessline.com/news/president-xi-to-meet-pm-modi-on-sidelines-of-sco-summit/article27703245.ece> [Diakses pada 27 Juni 2019]
- PTI. 2019. *SCO Summit: PM Modi holds 'extremely fruitful meeting' with Chinese President Xi in Bishkek*. <https://www.businesstoday.in/current/world/sco-summit-pm-modi-holds-extremely-fruitful-meeting-chinese-president-xi-bishkek/story/355914.html> [Diakses pada Juni 27 2019]
- Putz, C. 2016. What's Happening at the 2016 SCO Summit in Uzbekistan? Depends On Who You Ask. R <https://thediplomat.com/2016/06/whats-happening-at-the-2016-sco-summit-in-uzbekistan-depends-on-who-you-ask/>. [Diakses pada 2 April 2019]
- RFE/RL. 2014. Shanghai Cooperation Organization Summit Opens. <https://www.rferl.org/a/shanghai-cooperation-summit-dushanbe/26577440.html>. [Diakses pada 26 Maret 2019]
- Sabyrbekov, A. 2013. Bishkek Hosts The 2013 SCO Summit. <https://www.cacianalyst.org/publications/field-reports/item/12810-bishkek-hosts-the-2013-sco-summit.html>. [Diakses pada 25 Maret 2019]
- Sajjanhar, A. 2016. India and the Shanghai Cooperation Organization. <https://thediplomat.com/2016/06/india-and-the-shanghai-cooperation-organization/>. [Diakses pada 11 April 2019]

- SCO. 2018. CHARTER OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION. <http://scochina.mfa.gov.cn/eng/zywj/t1495656.htm>. [Diakses pada 26 Agustus 2018]
- SCO. 2017. Exetrnal Communication. <http://eng.sectsc.org/cooperation/>. [Diakses pada 2 April 2019]
- SCO. 2015. Frequently Asked Questions. Retrieved March 28, 2019, from <http://eng.sectsc.org>: <http://eng.sectsc.org/docs/about/faq.html>. [Diakses pada 28 September 2018]
- SCO. 2017. General information about the SCO Secretariat. <http://eng.sectsc.org/secretariat/>. [Diakses pada 17 Juni 2019]
- SCO. 2017. Structure of the Shanghai Cooperation Organisation. <http://eng.sectsc.org/structure/>. [Diakses pada 15 Juni 2019]
- Shopie, H. 2007. Confidence-building measure. Retrieved September 20, 2018, from www.britannica.com: <https://www.britannica.com/topic/confidence-building-measure>. [Diakses pada 20 September 2018]
- Sinaga, L. C. 2017. Bergabungnya Pakistan dan India ke Dalam Shanghai Cooperation Organization (SCO). <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1149-bergabungnya-pakistan-dan-india-ke-dalam-shanghai-cooperation-organization-sco>. [Diakses pada 20 Juli 2019]
- Stratfor. 2012. The Geopolitics of India: A Shifting, Self-Contained World. [ttps://worldview.stratfor.com/article/geopolitics-india-shifting-self-contained-world](https://worldview.stratfor.com/article/geopolitics-india-shifting-self-contained-world). [Diakses pada 30 Januari 2019]
- TIMESOFINDIA.COM . 2018. *PM Modi's meetings with China's Xi Jinping: A timeline* . <https://timesofindia.indiatimes.com/india/pm-modis-meetings-with-chinas-xi-jinping-a-timeline/articleshow/64510931.cms> [Diakses pada Juni 27 2019]

- Usmanov, J. 2018. The Shanghai Cooperation Organization: Harmony or Discord? <https://thediplomat.com/2018/06/the-shanghai-cooperation-organization-harmony-or-discord/>. [Diakses pada 2 April 2019]
- Weitz, R. 2012. IS THE SCO COMING TO LIFE? <https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/12540-analytical-articles-caci-analyst-2012-8-8-art-12540.html>. [Diakses pada 25 September 2018]
- Woody, C. 2018. Tensions are still simmering a year after the world's 2 biggest countries almost clashed over a border at the top of the world. <https://www.businessinsider.sg/tensions-between-china-and-india-continue-year-after-doklam-standoff-2018-8/?r=US&IR=T>. [Diakses pada 23 Januari 2018]